

RUANG GAGASAN

SUARA-SUARA GENERASI MUDA UNTUK BANGSA

GAGASAN KOMUNITAS MUDA RUANG GAGASAN
TENTANG EKONOMI INDONESIA



Dipersembahkan oleh :

CORE
INDONESIA
CENTER OF REFORM ON ECONOMICS

SUARA-SUARA GENERASI MUDA UNTUK BANGSA

GAGASAN KOMUNITAS MUDA RUANG GAGASAN
TENTANG EKONOMI INDONESIA



**RUANG
GAGASAN**

PENGANTAR

Indonesia memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusi generasi muda. Berdasarkan data BPS (2024), terdapat 66,9 juta penduduk berusia 15–29 tahun atau sekitar 24,04% dari total populasi. Bonus demografi yang berlangsung pada periode 2020–2035, dengan proporsi usia produktif mencapai 64% dari total populasi, menjadi peluang strategis bagi percepatan pembangunan ekonomi nasional. Dengan lebih dari 191 juta penduduk usia produktif yang mayoritas berasal dari Generasi Z, Indonesia perlu memastikan peningkatan keterampilan dan kualitas pendidikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan sekitar 9 juta talenta digital hingga 2030.

Namun, potensi tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan struktural seperti stagnasi ekonomi, rendahnya penciptaan lapangan kerja, minimnya wirausaha muda, dan ancaman perubahan iklim. Pada 2024, BPS mencatat 9,01 juta pemuda usia 15–24 tahun atau 20,31% tergolong *Not in Employment, Education, or Training (NEET)*. Meskipun angkanya menurun dibanding masa pandemi, persentase ini masih lebih tinggi dari rata-rata dunia sebesar 20,4%.

Selain itu, Indonesia menghadapi krisis lingkungan yang memerlukan tindakan segera. Masalah utama mencakup darurat sampah rumah tangga terutama sisa makanan dan plastik yang belum tertangani dengan baik, serta kapasitas daur ulang yang masih terbatas. Tantangan menuju *net-zero emission* juga besar, dengan ketergantungan tinggi pada energi fosil dan peningkatan emisi per kapita yang terus terjadi.

Perkembangan digitalisasi yang pesat juga perlu diseimbangkan dengan penguatan ekonomi hijau, mengingat keberlanjutan lingkungan kini menjadi bagian penting dalam tata kelola bisnis global. Dalam konteks ini, Ruang Gagasan, yang diselenggarakan oleh CORE Indonesia, hadir untuk mendorong generasi muda menjadi aktor utama dalam membangun ekonomi digital yang inklusif sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Melalui tema pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi digital, *Youth Economic Summit* menjadi wadah bagi inovasi dan kolaborasi pemuda dalam menjawab tantangan ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari rangkaian acara *Youth Economic Summit*, Ruang Gagasan mengumpulkan pandangan anak muda tentang berbagai isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Isu-isu yang dibahas meliputi dinamika bonus demografi, kondisi pekerja gig, permasalahan sampah dan emisi, pemberdayaan UMKM, hingga peran generasi muda dalam menjaga semangat kemerdekaan. Dari diskusi tersebut lahir sejumlah tawaran solusi yang dirangkum dalam laporan ini.

Suara-suara dari Ruang Gagasan tentu tidak mewakili seluruh anak muda Indonesia, tetapi refleksi pemikiran ini menunjukkan bagaimana generasi muda memandang persoalan bangsa dari sudut pandang mereka sendiri. Pandangan tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa anak muda kini hanya sibuk dengan urusan pribadi tanpa kepedulian sosial.

Hasil kegiatan Ruang Gagasan disajikan dalam dua bentuk: pertama, laporan kegiatan; kedua, ringkasan diskusi dalam bentuk buku digital yang dapat diunduh secara gratis. Harapannya, gagasan dan aspirasi generasi muda yang terhimpun melalui forum ini dapat menjadi masukan berharga bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Atas partisipasi seluruh pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 November 2025

Ruang Gagasan

RUANG GAGASAN

Ruang Gagasan merupakan sebuah forum strategis yang menghimpun berbagai pemikiran dan gagasan dari beragam elemen anak muda. Forum yang digelar secara rutin di kantor CORE Indonesia, Tebet, Jakarta Selatan, dan berbagai lokasi lainnya, ini menghimpun pandangan kaum muda baik yang tergabung dalam komunitas tertentu maupun perseorangan dari berbagai latar belakang. Sejauh ini komunitas muda yang terlibat berasal dari kalangan BUMN, birokrat, akademisi, pengusaha, dan profesional.

Forum ini telah diselenggarakan sebanyak sembilan kali pertemuan sejak Februari-Oktober tahun 2024 dan tujuh pertemuan sejak April-September tahun 2025 dengan mengangkat berbagai isu strategis yang mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertemuan berlangsung secara interaktif melalui penggabungan metode diskusi, lokakarya, bermain peran dan permainan. Sesekali diskusi dilakukan secara formal, namun keakraban antarpeserta diutamakan dalam setiap pertemuan. Di sini, kami ingin membangun kolaborasi bukan kompetisi. Hasil dari setiap diskusi tidak hanya berhenti menjadi wacana, melainkan dirumuskan ke dalam dokumen rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak terkait di berbagai sektor.

PERKENALAN

KOMUNITAS MUDA YANG BERSUARA

Komunitas muda yang bersuara di sini tidak bersifat elitis dan dijamin non-politis. Personal dan komunitas bergabung demi membahas hal-hal strategis yang mungkin bikin miris tapi sejatinya strategis. Sebab itu, suara-suara yang muncul dari ruang ini tidak semata kritis, tapi juga memiliki landasan teoritis dan sebagian besar berasal dari pengalaman praktis. Berbagai perspektif ditampung dalam diskusi interaktif untuk kemudian dikemas sebagai pemikiran kolaboratif. Siapa pun boleh bergabung dan turut bersuara, asalkan muda dan berpikiran inklusif.

KOMUNITAS MUDA

Ruang Gagasan telah diikuti oleh hampir 500 anak muda yang berasal dari berbagai latar belakang yang memperkaya sudut pandang pembahasan. BUMN Muda hadir dengan pengalaman praktis mereka dalam pengelolaan berbagai sektor strategis negara. Sementara ASN Muda membawa perspektif dari sisi birokrasi dan implementasi kebijakan publik. Keterlibatan akademisi memberikan landasan teoretis dan hasil riset terkini yang memperkuat basis argumentasi. Pengusaha muda turut menyumbangkan pandangan dari sisi praktik bisnis dan dinamika pasar. Keberagaman latar belakang ini menciptakan diskusi yang komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan.

PEMBAHASAN

PERSOALAN EKONOMI GENERASI MUDA

Generasi muda Indonesia menghadapi tantangan serius. Diharapkan jadi generasi emas, tapi data menunjukkan situasi cemas, hampir 10 juta pemuda menganggur dan tidak terdidik. Situasi kalangan muda makin terjepit ekonomi yang stagnan, yang berdampak sempitnya lapangan kerja baru dan minimnya wirausaha muda. Di sisi lain, ada kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan talenta digital menjelang 2030. Jangan sampai bonus demografi berubah menjadi bencana demografi, tapi bagaimana caranya?

1. SIAPA BERANI MENURUNKAN EMISI

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang semakin mendesak dengan temperatur bumi yang terus menunjukkan tren kenaikan yang mengkhawatirkan. Perjanjian Paris yang disepakati tahun 2015 telah menetapkan target untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dari masa pra-industri, dengan upaya lebih lanjut untuk membatasi kenaikan hingga 1,5°C. Namun data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2023, suhu bumi suhu bumi telah mencapai 1,48°C dari masa pra-industri, mendekati batas kritis (World Meteorological Organization/WMO Report, 2024). Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan lantaran target penurunan emisi gas rumah kaca menunjukkan hasil yang memprihatinkan.

Dengan target penurunan emisi sebesar 912 juta ton pada tahun 2030, Indonesia baru berhasil menurunkan emisi sekitar 91,5 juta ton, atau hanya 10% dari target. Hal ini mencerminkan bahwa upaya yang dilakukan masih jauh dari harapan dan tidak cukup untuk memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris 2015. Peningkatan suhu bumi membawa dampak serius, termasuk perubahan iklim, mencairnya es di kutub, kehilangan keanekaragaman



Ruang Gagasan edisi "Siapa Berani Turunkan Emisi".
CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Rabu, 28 Februari 2024

hayati, dan penurunan kesehatan manusia. Di tingkat global, sektor energi masih menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca dengan menyumbang sekitar 73,2% dari total emisi global, transportasi 16,2%, manufaktur dan konstruksi 12,4%, dan sektor energi lainnya 3,2% (International Energy Agency/IEA Report, 2023). Sementara di Indonesia, Berdasarkan data Kementerian LHK, 44% emisi di Indonesia berasal dari sektor energi, 33,8% berasal dari perubahan lahan kehutanan, 10,4% dari pertanian, 9% berasal dari sampah.

Pemanasan global dapat berdampak besar pada ekonomi, termasuk potensi penurunan PDB hingga 10% pada 2025 (Kementerian Keuangan, 2023). Dampak ini berisiko menghambat pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.



Ruang Gagasan edisi "Siapa Berani Turunkan Emisi".
CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Rabu, 28 Februari 2024

Oleh karena itu, penurunan emisi gas rumah kaca menjadi langkah penting yang harus diambil untuk mencegah bencana lingkungan yang lebih besar.

Namun, banyak tantangan yang menghambat proses penurunan emisi. Ketergantungan Indonesia pada sumber daya fosil masih sangat tinggi. Hal ini berkaitan dengan potensi dampak sosial-ekonomi pada masyarakat yang bergantung pada sektor-sektor tersebut, termasuk potensi hilangnya lapangan kerja di industri konvensional. Berdasarkan analisis International Labour Organization (ILO, 2023), diperkirakan lebih dari 2,5 juta pekerja di Indonesia akan membutuhkan program peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi dalam proses transisi ini.

Fokus yang berbeda antar negara terhadap prioritas perubahan iklim juga memperburuk situasi. Beberapa negara lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi daripada penurunan emisi, mengakibatkan kurangnya kerja sama internasional yang solid dan terkoordinasi dalam mengatasi masalah ini. Di samping itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pilihan energi yang mereka ambil menjadi kendala yang signifikan. Tanpa edukasi yang memadai mengenai pentingnya energi hijau, peralihan ke pilihan yang lebih berkelanjutan akan berlangsung lambat.

Isu perubahan iklim ini tidak hanya menjadi tantangan global, tetapi juga secara langsung memengaruhi masa depan anak muda yang akan mewarisi bumi di masa mendatang. Perlunya kesadaran yang tinggi dari para generasi muda bahwa dampak negatif perubahan iklim akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka jika tidak ditanggulangi sejak dini. Karena itu, pemuda kini memainkan peran penting dalam mendesak adanya kebijakan yang lebih berani untuk mengurangi emisi karbon dan mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan.



KENDALA PENDANAAN DAN REGULASI

Negara-negara menghadapi kesulitan dalam mencapai target penurunan emisi karena kendala pada aspek pendanaan, di mana kebutuhan investasi untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon diperkirakan mencapai USD 479 miliar hingga tahun 2030 (Climate Policy Initiative Report, 2023).

Kesenjangan pendanaan ini diperparah oleh masih terbatasnya akses ke pembiayaan hijau dan rendahnya insentif untuk investasi ramah lingkungan di berbagai sektor.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan infrastruktur dan teknologi, terutama di sektor energi. Indonesia masih menghadapi kendala dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan, termasuk jaringan transmisi yang belum memadai dan keterbatasan teknologi penyimpanan energi (International Renewable Energy Agency/IRENA, 2023).

Di sektor kehutanan dan lahan, tantangan utama mencakup kesulitan dalam pemantauan dan penegakan hukum terkait alih fungsi lahan (World Resources Institute, 2023).

Situasi ini diperparah dengan adanya regulasi yang menghambat pengembangan PLTS Atap, seperti Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2021 yang mengatur skema ekspor impor listrik dengan rasio 1:0,6, dimana pelanggan hanya mendapatkan kompensasi 60% dari kelebihan listrik yang dieksport ke jaringan PLN. Regulasi ini dinilai kurang menarik bagi investasi PLTS Atap dan menghambat pemanfaatan energi surya yang berlimpah di Indonesia (IESR, 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antar regulasi yang kuat. Regulasi tidak hanya harus diciptakan, tetapi juga harus ditaati dan ditegakkan. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif, melibatkan semua pemangku kepentingan agar regulasi yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik.

TATA KELOLA DAN KOLABORASI

Pentingnya tata kelola pemerintahan dan paradigma pengusaha harus menjadi perhatian utama. Banyak pengusaha yang masih berfokus pada keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Pengusaha yang lebih pro-lingkungan diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mendukung energi berkelanjutan. Selain itu, masyarakat dapat berperan aktif melalui berbagai inisiatif sederhana seperti penggunaan transportasi umum secara masif, gerakan hemat energi listrik komunal. Di bidang pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah juga terbukti efektif mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi emisi sangat krusial. Komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk penurunan emisi juga menjadi sangat penting. Incentif atau pengurangan pajak bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor hijau dapat menjadi langkah yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penurunan emisi..



Ruang Gagasan edisi "Siapa Berani Turunkan Emisi". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Rabu, 28 Februari 2024



Ruang Gagasan edisi "Siapa Berani Turunkan Emisi".
CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Rabu, 28 Februari 2024



Ruang Gagasan edisi "Siapa Berani Turunkan Emisi".
CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Rabu, 28 Februari 2024

KESIMPULAN

Penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan. Dengan berbagai tantangan yang ada, mulai dari ketergantungan pada sumber daya fosil hingga rendahnya kesadaran masyarakat, langkah-langkah yang lebih komprehensif dan terkoordinasi diperlukan. Sinergi antara regulasi yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan terhadap teknologi energi terbarukan menjadi kunci dalam upaya mencapai target penurunan emisi yang telah ditetapkan. Tanpa tindakan yang konkret dan kolaborasi yang solid, Indonesia akan kesulitan untuk memenuhi komitmennya dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan.



REKOMENDASI

- **Sinergi Regulasi** : Pemerintah perlu melakukan sinergi dan melibatkan stakeholder dalam proses pembuatan regulasi atau kebijakan. Salah satu bentuk konkretnya adalah kebijakan pemanfaatan energi surya atau PLTS Atap sebagai sumber energi ramah lingkungan sebagai langkah mengurangi emisi dari sektor energi. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan insentif untuk mendorong sektor swasta dapat turut berpartisipasi
- **Edukasi Masyarakat** : Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak penggunaan energi fosil dan manfaat energi terbarukan harus menjadi prioritas. Kampanye edukasi hemat energi, penggunaan transportasi umum dan promosi produk hijau perlu dilakukan secara masif.
- **Dukungan untuk Pendanaan di sektor hijau** : Pemerintah perlu meningkatkan dukungan dan inovasi pendanaan dengan berbagai alternatif seperti penerbitan instrumen hijau seperti Green Bonds & Green Sukuk. Selain itu perlunya dukungan APBN untuk program dan proyek rendah karbon untuk menginsentif sektor swasta terlibat dalam proyek hijau
- **Kolaborasi Lintas Sektor** : Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan meningkatkan kapasitas produksi EBT.

2. BIAYA KULIAH KELAS MENENGAH

Selama beberapa dekade terakhir, arah kebijakan sosial di Indonesia masih didominasi oleh program-program yang menargetkan masyarakat prasejahtera dan kelompok yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Meskipun fokus tersebut memang tepat dan diperlukan mengingat urgensi penanganan kemiskinan, namun hal ini menciptakan kesenjangan dalam perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat lainnya. Secara khusus, segmen kelas menengah yang jumlahnya kini bahkan mengalami penurunan. Kelas menengah belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang spesifik.

Kesenjangan kebijakan ini terlihat nyata dalam sektor pendidikan tinggi. Meski ada kebijakan mandatory spending untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun yang dialokasikan untuk perguruan tinggi hanya 0,6 persen dari APBN. Alokasi tersebut jauh di bawah rekomendasi UNESCO yang minimal 2 persen dari APBN. Kecilnya anggaran pemerintah untuk pendidikan tinggi mendorong setiap kampus harus mencari pendanaan lain, salah satunya lewat UKT (Uang Kuliah Tunggal)..

Pemberlakuan UKT ini bermula dari perubahan kebijakan menjadikan status perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Kebijakan PTN-BH memberikan kewenangan kepada setiap perguruan tinggi negeri untuk mengelola sumber dayanya, termasuk penentuan biaya pendidikan. Besaran UKT setiap kampus negeri berbeda-beda, tergantung biaya operasional dan diversifikasi sumber pendapatannya.

Kelas menengah, yang sebenarnya berperan vital sebagai penggerak ekonomi, kini menghadapi dilema ganda. Di satu sisi, mereka memiliki kerentanan tersendiri terhadap guncangan sosial-ekonomi, namun di sisi lain sering kali kesulitan mengakses bantuan pendidikan atau beasiswa karena dianggap "terlalu mampu" untuk kriteria pemerintah. Minimnya kerangka regulasi yang melindungi kelas menengah ini tidak hanya menghambat mobilitas sosial tetapi juga menyebabkan stagnasi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang mengenyam pendidikan tinggi pada tahun 2023 saja masih di kisaran 10,15 persen.

Situasi ini semakin diperparah dengan munculnya fenomena pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan pendidikan. Meskipun menjadi pilihan praktis, tingginya bunga pinjaman justru berpotensi menciptakan beban finansial jangka panjang bagi mahasiswa.

andingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, India, dan Malaysia yang telah mengembangkan skema pinjaman pendidikan yang lebih fleksibel dan inklusif.

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU

Salah satu isu sentral dalam pembahasan ini adalah tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN BH. Meningkatnya biaya ini disebabkan oleh hilangnya subsidi penuh dari pemerintah, yang berakibat pada beban biaya pendidikan yang sepenuhnya ditanggung mahasiswa. Oleh karena itu, perluasan subsidi pendidikan menjadi solusi penting untuk meringankan beban mahasiswa.

Pengembangan skema pembayaran kuliah yang lebih fleksibel juga harus dipertimbangkan. Jika perbankan terlibat dalam pembiayaan pendidikan, maka bank dapat menawarkan pinjaman dengan aturan yang jelas dan transparan. Namun, penyaluran kredit oleh bank harus dilakukan dengan hati-hati agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap terjaga.

KESIMPULAN

Permasalahan biaya pendidikan tinggi di Indonesia adalah isu yang kompleks, dihadapkan pada keterbatasan dukungan pemerintah, tingginya biaya kuliah, dan preferensi investor. Meskipun ada program bantuan, masih banyak mahasiswa yang terjebak dalam kesulitan finansial. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu langkah-langkah konkret, termasuk perluasan subsidi pendidikan, program edukasi bagi masyarakat, dan kolaborasi dengan perbankan untuk menyediakan produk keuangan yang mendukung. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan pendidikan tinggi di Indonesia dapat menjadi lebih terjangkau dan aksesibel bagi semua lapisan masyarakat.

REKOMENDASI UNTUK ALTERNATIF SKEMA PEMBAYARAN

- **Perluasan Cakupan Subsidi Pendidikan:** Pemerintah perlu memperluas cakupan subsidi pendidikan sehingga dapat menjangkau mahasiswa dari semua lapisan ekonomi. Ini mencakup skema pencicilan yang lebih fleksibel dan keringanan biaya bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
- **Edukasi Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak penggunaan energi fosil dan manfaat energi terbarukan harus menjadi prioritas. Kampanye edukasi hemat energi, penggunaan transportasi umum dan promosi produk hijau perlu dilakukan secara masif.
- **Dukungan untuk Pendanaan di sektor hijau:** Pemerintah perlu meningkatkan dukungan dan inovasi pendanaan dengan berbagai alternatif seperti penerbitan instrumen hijau seperti Green Bonds & Green Sukuk. Selain itu perlunya dukungan APBN untuk program dan proyek rendah karbon untuk menginsentif sektor swasta terlibat dalam proyek hijau



3. UMKM MUDA BERANI EKSPOR

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, di tahun 2022, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja. Di tengah dinamika ekonomi global dan persaingan yang semakin ketat, UMKM Indonesia, terutama yang dikelola oleh generasi muda, memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang melalui ekspansi ke pasar internasional.

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk UMKM Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, yakni hanya berkontribusi 15% terhadap ekspor nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi yang belum digali dan dikembangkan oleh UKM Indonesia, khususnya yang dikelola oleh anak muda. Misalnya, produk-produk kerajinan tangan, fashion, dan makanan olahan memiliki daya tarik yang besar di pasar internasional, namun masih memerlukan peningkatan dari segi kualitas dan pemasaran.

Generasi muda dikenal dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap teknologi baru dan perubahan pasar yang dinamis. Di era digital ini, akses terhadap informasi dan pasar global menjadi lebih mudah, memberikan kesempatan emas bagi UKM muda untuk menjangkau konsumen di luar negeri. Ekspansi ke pasar ekspor bukan hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing, kualitas produk, dan kepercayaan diri pelaku usaha muda dalam menghadapi persaingan global.



TANTANGAN YANG DIHADAPI UKM DALAM EKSPOR

Meskipun demikian, langkah untuk memasuki pasar ekspor tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pemahaman tentang regulasi ekspor, kemampuan bersaing dengan produk luar negeri, hingga mengatasi kendala logistik dan pengiriman. Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh UKM dalam proses ekspor adalah biaya logistik yang tinggi. Biaya produksi mungkin lebih murah, tetapi tingginya biaya logistik membuat produk Indonesia tidak kompetitif di pasar internasional. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap infrastruktur dan sistem logistik sangat penting untuk menurunkan biaya tersebut.



Lebih jauh sebelum terjun ke pasar ekspor, pelaku UKM perlu meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan. Langkah ini bisa dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan standarisasi produk agar memenuhi standar internasional. Pemasaran yang kuat juga menjadi kunci sukses bagi UKM dalam memasuki pasar global. UKM perlu aktif mengikuti pameran dagang internasional dan melakukan promosi secara online. Selain itu, membangun jaringan dengan pembeli potensial di luar negeri menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar.

Penting bagi UKM untuk memahami regulasi perdagangan internasional untuk menghindari kendala yang dapat menghambat proses ekspor. Pelatihan dan seminar mengenai ekspor-impor, serta konsultasi dengan lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan, sangat diperlukan untuk memperoleh informasi terkini mengenai regulasi yang berlaku. Kerja sama dengan pihak lain juga penting; UKM dapat bergabung dengan asosiasi, mengikuti program business matching, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan multinasional untuk membuka akses pasar yang lebih luas.

Inovasi berkelanjutan juga sangat penting bagi UKM untuk menjaga daya saing mereka di pasar internasional. Mereka perlu mengembangkan produk baru, mengikuti tren pasar, dan memanfaatkan teknologi terbaru dalam proses produksi dan pemasaran. Oleh karena itu, penting bagi UKM muda untuk dibekali dengan pengetahuan yang memadai mengenai potensi pasar ekspor dan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi juga diperlukan untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang dibutuhkan.

Untuk meningkatkan kapasitas calon eksportir, pemerintah dan lembaga terkait perlu aktif mendorong partisipasi mereka dalam program Kelas Ekspor. Pendampingan menyeluruh sangat diperlukan, mulai dari memberikan informasi pasar hingga mengelola dokumen ekspor yang kompleks. Komunikasi yang baik dengan Kementerian Luar Negeri juga penting untuk mengakses informasi pasar dan regulasi negara tujuan.

KESIMPULAN

UMKM Indonesia memiliki peran penting dalam ekonomi nasional dengan kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Meski potensial untuk ekspansi ke pasar global, kontribusi ekspor UMKM masih rendah dibandingkan negara tetangga, dengan tantangan utama pada kualitas produk, biaya logistik, dan pemahaman regulasi. Generasi muda yang kreatif dan terbuka terhadap teknologi memiliki peluang besar di pasar internasional, namun memerlukan peningkatan produk, pemasaran, dan akses jaringan. Dukungan pemerintah dalam pelatihan, infrastruktur, dan konsultasi, serta pembentukan roadmap ekspor, dapat memperkuat daya saing UMKM Indonesia di pasar global.



REKOMENDASI

- **Pelatihan dan Edukasi** : Meningkatkan pelatihan dan seminar tentang ekspor-impor untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada UKM mengenai regulasi dan proses ekspor.
- **Pengembangan Infrastruktur** : Fokus pada peningkatan infrastruktur dan sistem logistik untuk menurunkan biaya ekspor, sehingga produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global.
- **Jaringan dan Kerja Sama** : Jaringan dan Kerja Sama : Mendorong UKM untuk bergabung dengan asosiasi dan menjalin kerja sama dengan perusahaan multinasional dan diaspora untuk membuka akses pasar yang lebih luas.
- **Pendampingan dan Konsultasi** : Memberikan pendampingan menyeluruh kepada calon eksportir, termasuk pengelolaan dokumen dan strategi pemasaran yang efektif.
- **Roadmap Ekspor** : Menyusun roadmap ekspor yang komprehensif untuk memberikan panduan strategis kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekspor.



Ruang Gagasan edisi "UMKM Muda Berani Ekspor". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 30 Mei 2024

4. PERTANIAN CERDAS UNTUK MASA DEPAN GENERASI MUDA

Hasil Sensus Pertanian 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia. Data sensus mengungkapkan bahwa mayoritas petani merupakan generasi yang lebih tua, yang menandakan bahwa profesi ini minim regenerasi. Dari sekitar 29 juta petani terdaftar, sekitar 70 persen berasal dari generasi X (usia 43-58 tahun) dan baby boomer (usia 59-77 tahun). Secara rinci, generasi X menyumbang 42,39 persen dan baby boomer 27,61 persen dari total petani. Sementara itu, petani muda dari kelompok Gen Z (usia 11-26 tahun) hanya mencakup 2,14 persen, atau sekitar 627 ribu orang—angka yang lebih rendah dibandingkan dengan pre-boomer (berusia di atas 78 tahun) yang mencapai 2,24 persen.



IMPLIKASI MINIMNYA REGENERASI PETANI

Fenomena minimnya regenerasi petani ini memunculkan kekhawatiran mendalam mengenai keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap inovasi yang dapat dibawa oleh pemuda, terutama dalam bidang pertanian, menjadi salah satu faktor penyebab. Selain itu, minimnya infrastruktur pertanian di daerah juga menghambat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, dan ketidakpastian pasar, semakin membuat petani muda enggan untuk terlibat. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mengimplementasikan transformasi digital dalam pertanian juga masih jauh dari harapan, sehingga mengakibatkan ketidakakuratan dalam rekapitulasi data pertanian.

Di sisi lain, kurangnya informasi tentang metode pengembangan pertanian dan kontrol harga pangan menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Padahal, keberadaan inovasi dan teknologi dalam pertanian cerdas sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing petani. Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan inovasi yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga berkelanjutan.

KOLABORASI UNTUK INOVASI PERTANIAN

Membangun inovasi dalam sektor pertanian memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan universitas. Kerja sama ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam mendukung perkembangan inovasi di bidang pertanian.

Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, perlu menjalin kemitraan dengan sektor swasta yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan teknologi pertanian. Melalui kolaborasi ini, solusi inovatif diharapkan dapat membantu petani mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi.

Kolaborasi antara pemerintah dan swasta juga penting dalam mengembangkan sistem kontrol harga pangan. Dengan adanya sistem yang baik untuk memantau dan mengendalikan harga, petani akan lebih terjamin dalam pemasaran produk mereka. Ketika harga pangan stabil, petani akan lebih terdorong untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian, yang berdampak positif bagi ketahanan pangan nasional.



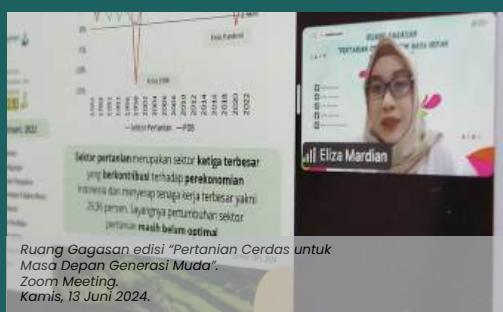
DUKUNGAN UNTUK GENERASI MUDA

Kehadiran pemerintah dalam mendukung generasi muda untuk berinovasi di bidang pertanian menjadi sangat krusial. Diharapkan, pemerintah dapat menyediakan wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam menerapkan pertanian cerdas dengan menggunakan konsep pertanian presisi. Selain itu, anak muda perlu dilibatkan dalam rekapitulasi data pertanian dan terhubung dengan program Satu Data Indonesia yang sedang dibangun. Program ini bertujuan menyediakan data akurat dan terintegrasi, memudahkan pengambilan keputusan dalam kebijakan pertanian.

Dengan memanfaatkan teknologi, generasi muda dapat berkontribusi dalam mengumpulkan dan menganalisis data pertanian. Mereka juga dapat memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan produk pertanian dan menjalin hubungan dengan pasar internasional. Dukungan dari pemerintah dalam hal pendidikan dan pelatihan juga perlu diperkuat agar generasi muda memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berinovasi di sektor pertanian.

KESIMPULAN

Tantangan demografi yang dihadapi oleh sektor pertanian Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Minimnya regenerasi petani dan minimnya keterlibatan generasi muda dalam bidang pertanian menjadi indikator bahwa sektor ini perlu inovasi dan revitalisasi. Dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak dan dukungan yang tepat, sektor pertanian di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan masa depan. Upaya ini tidak hanya akan memastikan keberlanjutan sektor pertanian tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional.



REKOMENDASI

- Peningkatan Infrastruktur**
Pertanian: Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pertanian di daerah untuk menarik generasi muda dan mempercepat adopsi teknologi.
- Program Pelatihan dan Edukasi:** Memperkuat program pelatihan bagi petani muda tentang teknik budidaya efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas.
- Kolaborasi Multi-Pihak:** Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan untuk menciptakan inovasi teknologi yang berkelanjutan dalam pertanian.
- Membangun Linkage dengan Koperasi atau Kelompok Tani:** Adanya kepastian pasar dan harga komoditas pertanian akan mendorong anak muda semangat menjadi petani. Mereka tidak akan dihadapkan dengan fluktuasi harga yang penuh ketidakpastian.
- Dukungan Teknologi dan Digitalisasi:** Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan data dan pemasaran produk pertanian untuk meningkatkan daya saing.

5. TANTANGAN PENGANGGURAN MUDA

Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, sekitar 69,13% dari total penduduk Indonesia berada dalam kelompok usia produktif. Bonus demografi ini memberikan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika dimanfaatkan dengan baik. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda.

Menurut data BPS pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda berusia 15-24 tahun mencapai 19,4%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional yang berada di angka 5,3%. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya pengangguran di kalangan pemuda antara lain kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, minimnya pengalaman kerja, dan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia.

Selain itu, program-program yang ada, seperti program Pra Kerja, belum mampu memberikan solusi yang signifikan terhadap masalah pengangguran di kalangan anak muda.

Jika melihat lebih dalam, sekitar 20,27 persen atau 9 juta anak muda Indonesia berusia 15-24 tahun tidak memiliki aktivitas produktif seperti tidak bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) pada tahun 2023.

MAGANG UNTUK PENGUATAN DAYA SAING PEKERJA MUDA

Program magang menjadi solusi strategis untuk memitigasi tingginya angka pengangguran generasi muda di Indonesia dalam konteks bonus demografi, dimana sistem pelatihan berbasis tempat kerja (On-Job Training) ini memfasilitasi peserta untuk memperoleh eksposur langsung terhadap kompetensi dan pengalaman profesional di lingkungan kerja nyata.

Program magang memberikan banyak manfaat baik bagi peserta magang maupun perusahaan, diantaranya memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja yang nyata. Mereka dapat belajar secara langsung dari para profesional berpengalaman dan memahami dinamika pekerjaan sehari-hari. Pengalaman ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing anak muda.

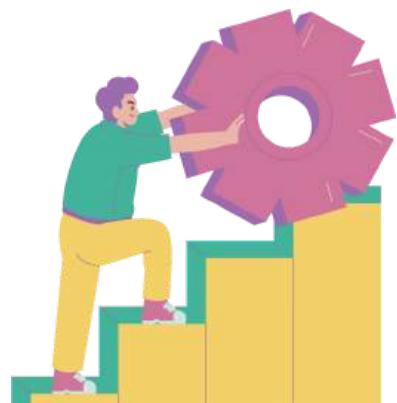
Selain mempersiapkan anak muda untuk menjadi pekerja yang kompeten, magang juga dapat menjadi inkubator bagi calon pebisnis muda. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, peserta magang dapat belajar tentang manajemen bisnis, inovasi, dan strategi pemasaran. Pengetahuan ini sangat berharga bagi mereka yang bercita-cita menjadi pebisnis.

Menghadapi tantangan pengangguran muda di tengah bonus demografi, pelatihan kerja melalui magang menawarkan solusi yang praktis dan efektif. Magang tidak hanya membantu mengurangi pengangguran di kalangan pemuda dengan memberikan mereka keterampilan yang relevan dan pengalaman kerja, tetapi juga membuka jalan bagi mereka yang bercita-cita menjadi pebisnis muda.

Dengan mendukung program magang yang komprehensif dan terstruktur, Indonesia dapat memanfaatkan potensi bonus demografi secara maksimal dan menciptakan generasi muda yang siap bersaing di pasar global, baik sebagai tenaga kerja profesional maupun sebagai pengusaha yang inovatif.

KESIMPULAN

Program magang memegang peran krusial dalam mengatasi tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda Indonesia, terutama di tengah momentum bonus demografi. Dengan memberikan pengalaman kerja nyata dan keterampilan yang relevan, magang meningkatkan daya saing anak muda dan mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia kerja profesional atau bahkan menjadi wiraswahan. Solusi ini mampu menjawab kebutuhan keterampilan praktis dan eksposur lapangan yang seringkali menjadi kekurangan para pencari kerja muda. Melalui dukungan terhadap program magang yang terstruktur, Indonesia memiliki peluang besar untuk memaksimalkan potensi demografi dan membentuk generasi muda yang kompetitif di tingkat global.



REKOMENDASI

- **Perluasan Program Magang Terstruktur:** Tingkatkan kerja sama antara pemerintah dan industri untuk menyediakan magang yang relevan dan berbasis keterampilan kerja.
- **Peningkatan Akses Magang:** Pastikan pemuda di berbagai daerah memiliki akses mudah ke program magang melalui subsidi dan platform digital.
- **Pelatihan Kewirausahaan:** Integrasikan pelatihan kewirausahaan dalam program magang untuk mendorong generasi muda menjadi pebisnis inovatif.



Ruang Gagasan edisi "Tantangan Pengangguran Muda". COREsight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 4 Juli 2024



Ruang Gagasan edisi "Tantangan Pengangguran Muda". COREsight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 4 Juli 2024

6. MODAL USAHA ANTI RIBET BAGI PEBISNIS MUDA

Perkembangan teknologi finansial atau fintech di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu inovasi fintech yang mendapat perhatian besar adalah peer-to-peer (P2P) lending. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2023, jumlah penyelenggara P2P lending yang terdaftar dan berizin mencapai lebih dari 150 perusahaan. Total penyaluran pinjaman melalui platform ini telah mencapai lebih dari Rp 200 triliun, menunjukkan bahwa P2P lending semakin menjadi alternatif yang signifikan dalam pembiayaan, terutama bagi pengusaha muda yang sering kesulitan mengakses modal dari lembaga keuangan konvensional.

Pengusaha muda di Indonesia kerap menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pendanaan untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tahun 2022, lebih dari 60% pengusaha muda menyatakan bahwa kesulitan terbesar mereka adalah akses ke modal. Lembaga keuangan tradisional seperti bank biasanya memerlukan jaminan dan riwayat kredit yang kuat, yang seringkali tidak dimiliki oleh pengusaha muda. P2P lending hadir sebagai solusi alternatif dengan proses yang lebih mudah dan cepat, serta persyaratan yang lebih fleksibel.

Namun, seiring dengan pertumbuhan P2P lending, muncul juga berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah masalah regulasi. Regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi konsumen dan memastikan kestabilan sistem keuangan. Namun, regulasi yang berlebihan dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan industri fintech. Menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mendorong inovasi dan perlindungan konsumen menjadi tantangan utama bagi regulator dan pelaku industri. OJK telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mengatur industri P2P lending, tetapi masih diperlukan penyesuaian dan peningkatan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan yang sehat.

Kepercayaan konsumen terhadap platform P2P lending juga menjadi isu krusial. Kasus-kasus penipuan dan gagal bayar yang terjadi di beberapa platform P2P lending telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Berdasarkan laporan dari AFPI pada tahun 2023, tercatat ada peningkatan pengaduan konsumen terkait penipuan dan masalah pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun P2P lending menawarkan peluang besar, masih ada risiko yang perlu dikelola dengan baik untuk menjaga kepercayaan publik.

Peningkatan literasi keuangan dan edukasi mengenai P2P lending menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pemerintah dan pelaku industri perlu bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan risiko P2P lending. Selain itu, penerapan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi P2P lending. Inovasi teknologi ini diharapkan dapat mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap platform P2P lending.

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN

Salah satu solusi yang diusulkan OJK untuk mengatasi tantangan dalam sektor ini adalah melalui peningkatan literasi keuangan. OJK merencanakan pelaksanaan pendidikan keuangan secara masif, yang mencakup berbagai aspek seperti edukasi keuangan tematik dan pengembangan infrastruktur edukasi keuangan. Melalui kampanye literasi keuangan nasional, OJK berharap masyarakat, terutama pelaku UMKM, dapat memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan manfaat dari akses terhadap layanan P2P lending.

Salah satu solusi yang diusulkan OJK untuk mengatasi tantangan dalam sektor ini adalah melalui peningkatan literasi keuangan. OJK merencanakan pelaksanaan pendidikan keuangan secara masif, yang mencakup berbagai aspek seperti edukasi keuangan tematik dan pengembangan infrastruktur edukasi keuangan.



Melalui kampanye literasi keuangan nasional, OJK berharap masyarakat, terutama pelaku UMKM, dapat memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan manfaat dari akses terhadap layanan P2P lending.



Ruang Gagasan edisi "Modal Usaha Anti Ribet bagi Pebisnis Muda", CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 25 Juli 2024



Ruang Gagasan edisi "Modal Usaha Anti Ribet bagi Pebisnis Muda", CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 25 Juli 2024

KESIMPULAN

Meskipun UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, tantangan pembiayaan yang signifikan harus segera diatasi. Upaya untuk mengembangkan industri fintech, meningkatkan literasi keuangan, dan memberantas pinjaman online ilegal menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor UMKM. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang komprehensif, diharapkan UMKM dapat terus berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

REKOMENDASI

- **Kebijakan Pendukung**

Pembiayaan: Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat akses UMKM terhadap pembiayaan, terutama dari sektor formal.

- **Dukungan untuk Fintech:**

Memberikan dukungan kepada industri fintech dalam menyediakan produk yang tepat bagi UMKM, dengan memperhatikan aspek keamanan dan transparansi.

- **Program Edukasi Keuangan:**

Melaksanakan program pendidikan keuangan untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang akses pembiayaan dan pengelolaan keuangan.

- **Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal:**

Mengintensifkan upaya pemberantasan pinjaman online ilegal untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas industri.



Ruang Gagasan edisi "Modal Usaha Anti Ribet bagi Pebisnis Muda". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 25 Juli 2024

7. POSISI KAUM MUDA SETELAH 79 TAHUN INDONESIA MERDEKA

Saat ini lebih dari 53% penduduk Indonesia adalah generasi milenial dan Gen Z. Indonesia berada di ambang bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam 11 tahun ke depan. Namun, tantangan yang dihadapi generasi ini sangat besar, terutama saat memasuki era penuaan ketika jumlah penduduk non-produktif akan melebihi penduduk produktif. Sementara itu, situasi pencarian kerja saat ini sudah cukup sulit, dan tanpa langkah proaktif, beban di masa depan akan semakin berat.

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya menghadapi pertumbuhan yang stagnan tetapi juga tantangan serius dari premature deindustrialisasi. Dalam dua dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun dari 6,4% (1980-2000) menjadi 5% dalam sepuluh tahun terakhir. Sektor manufaktur yang pada tahun lalu masih berkontribusi 32% terhadap PDB, kini turun menjadi hanya 18,5%. Hal ini memperlihatkan bahwa kapasitas untuk menciptakan lapangan kerja semakin mengecil, dan situasi ini sangat memprihatinkan,

terutama bagi masyarakat yang 56%-nya adalah lulusan SMP ke bawah.

Sementara itu, angka NEET (Not in Education, Employment, or Training) di Indonesia mencapai 20,6%, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (10%) dan Filipina (12%). Dampak dari semua ini adalah bahwa generasi muda yang tidak mampu mandiri diharapkan harus menghidupi orang tua mereka di masa depan.



Ruang Gagasan edisi "Posisi Kaum Muda Setelah 79 Tahun Indonesia Merdeka".
CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Rabu, 14 Agustus 2024

KESIMPULAN

Masa depan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada langkah yang diambil oleh generasi muda hari ini. Dengan tantangan yang ada, seperti deindustrialisasi dan tingginya angka NEET, sudah saatnya anak muda menyadari peran penting mereka dalam menciptakan perubahan. Kesadaran akan tanggung jawab kolektif, peningkatan pendidikan dan keterampilan, serta tindakan nyata dalam memperjuangkan keadilan ekonomi adalah langkah-langkah kunci untuk meraih cita-cita Indonesia Emas 2045. Dengan keberanian dan semangat kolaborasi, generasi muda dapat mewujudkan kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.



Ruang Gagasan edisi "Posisi Kaum Muda Setelah 79 Tahun Indonesia Merdeka".
CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Rabu, 14 Agustus 2024

REKOMENDASI

- Meningkatkan Keterampilan dan Pendidikan:** Anak muda harus berinvestasi dalam keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan dan pendidikan yang memadai akan membuka peluang kerja yang lebih baik.
- Berpartisipasi dalam Kebijakan Publik:** Generasi muda perlu lebih aktif dalam menyuarakan pendapat mengenai kebijakan ekonomi dan sosial, serta mendorong pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan penciptaan lapangan kerja.
- Membangun Jejaring dan Kolaborasi:** Kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, akan memperkuat gerakan perubahan. Anak muda perlu membangun jejaring untuk berbagi ide dan sumber daya.
- Mengambil Inisiatif dalam Perubahan Sosial:** Mengambil sikap aktif dan berkontribusi dalam masyarakat adalah bentuk cinta tanah air. Anak muda harus berani melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan politik untuk menciptakan perubahan yang berarti.



Ruang Gagasan edisi "Posisi Kaum Muda Setelah 79 Tahun Indonesia Merdeka". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Rabu, 14 Agustus 2024



Ruang Gagasan edisi "Posisi Kaum Muda Setelah 79 Tahun Indonesia Merdeka". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Rabu, 14 Agustus 2024



Ruang Gagasan edisi "Posisi Kaum Muda Setelah 79 Tahun Indonesia Merdeka". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Rabu, 14 Agustus 2024



8. ANAK MUDA PEDULI SAMPAH

Pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan serius seiring dengan meningkatnya populasi dan konsumsi yang mendorong produksi sampah yang semakin besar. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan lebih dari 38 juta ton sampah per tahun. Sebagian besar sampah ini tidak dikelola dengan baik dan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang memicu pencemaran lingkungan, peningkatan emisi gas rumah kaca, serta krisis perubahan iklim.

Namun, dibalik masalah tersebut, terdapat peluang besar untuk menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan melalui pengelolaan sampah. Berbagai kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, mendorong sektor swasta dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengurangan, pengelolaan, dan daur ulang sampah.

Dalam konteks ini, generasi muda Indonesia memainkan peran krusial sebagai agen perubahan dalam pengelolaan sampah. Melalui kreativitas dan kepekaan terhadap isu lingkungan, banyak anak muda telah menginisiasi startup dan gerakan sosial yang berfokus pada pengelolaan sampah berkelanjutan. Mereka tidak hanya menciptakan solusi inovatif seperti aplikasi bank sampah digital dan sistem daur ulang berbasis teknologi, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat melalui platform media sosial tentang pentingnya pemilahan sampah dan ekonomi sirkular. Semangat kewirausahaan sosial yang dimiliki generasi muda ini menjadi katalis penting dalam mentransformasi tantangan sampah menjadi peluang ekonomi yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

STUDI KASUS BANYUMAS: PENGELOLAAN SAMPAH TERINTEGRASI

Salah satu contoh sukses dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang telah menjadi model bagi beberapa kota di ASEAN. Banyumas meluncurkan program "Banyumas Zero Waste" pada tahun 2018 dengan pendekatan holistik yang menggabungkan teknologi, kolaborasi dengan sektor swasta, dan partisipasi masyarakat. Program ini berhasil mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sebesar 40% dalam lima tahun pertama.

Inovasi yang diusung oleh Banyumas yakni proses pengelolaan sampah dengan penggunaan teknologi.

Sampah organik akan diproses hingga menjadi maggot, yang grade A dapat diekspor ke Korea dan Taiwan sebagai bahan kosmetik. Selanjutnya pengelolaan sampah anorganik sebagai bahan untuk menghasilkan paving blok dan co-firing sebagai bahan campuran batubara pada PLTU.

Sampah organik akan diproses hingga menjadi maggot, yang grade A dapat diekspor ke Korea dan Taiwan sebagai bahan kosmetik. Selanjutnya pengelolaan sampah anorganik sebagai bahan untuk menghasilkan paving blok dan co-firing sebagai bahan campuran batubara pada PLTU.

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan besar, namun juga menawarkan peluang ekonomi dan lingkungan yang signifikan jika dikelola dengan baik. Studi kasus Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang memadukan teknologi, kolaborasi, dan kebijakan yang mendukung dapat mengurangi volume sampah secara drastis dan membuka peluang bisnis berkelanjutan. Dengan mengikuti jejak Banyumas, daerah lain di Indonesia dapat menerapkan strategi serupa untuk menciptakan model pengelolaan sampah yang efektif, inovatif, dan berdampak positif secara ekonomi dan ekologi.



Ruang Gagasan edisi "Anak Muda Peduli Sampah".
TPST kedunggrandu, Banyumas, Jawa Tengah
Kamis, 18 September 2024



Ruang Gagasan edisi "Anak Muda Peduli Sampah".
TPST kedunggrandu, Banyumas, Jawa Tengah
Kamis, 18 September 2024

REKOMENDASI

- **Peningkatan Teknologi Pengelolaan Sampah:** Daerah-daerah lain di Indonesia perlu mengadopsi teknologi pengelolaan sampah yang inovatif, seperti yang dilakukan di Banyumas, untuk mengoptimalkan pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi produk bernilai ekonomis.
- **Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat:** Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang serta mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Program yang melibatkan berbagai pihak ini mampu meningkatkan partisipasi dan efektivitas pengelolaan.
- **Penguatan Kebijakan dan Regulasi:** Perlu adanya penguatan serta implementasi yang lebih ketat terhadap kebijakan pengelolaan sampah, termasuk mendorong inovasi dan investasi di sektor daur ulang dan pengolahan limbah, untuk mencapai target pengurangan sampah yang signifikan.



9. AKAL IMITASI MEMPERCEPAT DISRUPSI

Akal imitasi alias kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah menjadi fenomena yang mengubah lanskap industri di berbagai sektor, termasuk media dan konten digital.

Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan data, tetapi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan berbasis algoritma. Namun, seperti halnya inovasi teknologi lainnya, perkembangan AI juga menimbulkan tantangan besar, terutama bagi pekerja di industri kreatif.

Menurut laporan Global AI Index 2022 yang diterbitkan oleh Tortoise Intelligence, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 62 negara yang disurvei dalam hal kesiapan, implementasi, dan inovasi AI. Meski berada di posisi terbawah, adopsi AI di Indonesia menunjukkan tren positif, terutama di kalangan pekerja dan pengusaha.

Studi yang dilakukan oleh Populix, sebuah platform wawasan konsumen, pada April 2023 memberikan gambaran yang lebih rinci. Dari 1.014 responden yang disurvei, 45% pekerja dan pengusaha Indonesia telah mengadopsi aplikasi AI dalam pekerjaan mereka, dengan ChatGPT menjadi yang paling populer diantara para pengguna AI (52%).

Ini menunjukkan bahwa, meski Indonesia tertinggal dari segi kesiapan, implementasi AI terus berkembang, terutama di industri media dan konten digital.

Dalam industri media digital Indonesia, adopsi AI semakin akeleratif, terutama di kalangan mahasiswa dan generasi muda yang aktif dalam produksi konten video. Teknologi ini memudahkan otomatisasi tugas-tugas seperti penjadwalan posting dan analisis keterlibatan audiens. Selain itu, AI juga digunakan untuk menghasilkan ide konten, mengoptimalkan judul, hingga meningkatkan kualitas video dengan teknologi pengenalan wajah dan objek.

Sejumlah teknologi AI yang populer di industri ini termasuk Text-to-Speech (TTS), presenter virtual berbasis AI, transkripsi otomatis, subtitling, hingga pengeditan video yang lebih cerdas. Teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam pengembangan konten.

Generasi muda Indonesia, memanfaatkan kombinasi kreativitas mereka dengan teknologi AI untuk menciptakan konten yang lebih engaging dan efisien, mulai dari konten pendidikan, hiburan, hingga marketing digital. Namun, di sisi lain, mereka juga menghadapi dilema antara mengoptimalkan efisiensi AI dan mempertahankan sentuhan kreatif manusia dalam karya mereka.

Hal ini mendorong munculnya tren "hybrid content creation" di kalangan kreator muda, di mana AI diposisikan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas, sementara originalitas dan nilai artistik tetap bersumber dari kreativitas manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia tidak hanya adaptif terhadap teknologi baru, tetapi juga kritis dalam memanfaatkannya untuk menciptakan nilai tambah dalam industri kreatif.

PELINDUNGAN PEKERJA KREATIF

Namun, perkembangan AI tidak lepas dari tantangan bagi para pekerja di industri kreatif. Menurut laporan *The Impact of AI on Creative Industries* yang diterbitkan oleh World Economic Forum pada 2023, diperkirakan 25-30% pekerjaan di industri kreatif global akan terdampak AI dalam lima tahun mendatang. Ini termasuk ancaman pengurangan pekerja manusia karena AI mampu menghasilkan konten secara cepat dan murah.

Salah satu masalah utama dalam pengembangan AI di Indonesia adalah anggaran yang terbatas. Dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, anggaran Indonesia untuk pengembangan AI jauh lebih kecil. Amerika Serikat, misalnya, mengalokasikan US\$328 juta untuk AI, sementara Indonesia hanya mengalokasikan sekitar Rp 1,3 triliun.

Amerika Serikat, misalnya, kondisi ini menyebabkan Indonesia hanya menjadi konsumen pengguna AI, tanpa menjadi pemain besar dalam inovasi teknologi AI.

Salah satu masalah utama dalam pengembangan AI di Indonesia adalah anggaran yang terbatas. Dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, anggaran Indonesia untuk pengembangan AI jauh lebih kecil. Amerika Serikat, misalnya, mengalokasikan US\$328 juta untuk AI, sementara Indonesia hanya mengalokasikan sekitar Rp 1,3 triliun. Kondisi ini menyebabkan Indonesia hanya menjadi konsumen pengguna AI, tanpa menjadi pemain besar dalam inovasi teknologi AI.

Masalah lainnya adalah devaluasi karya kreatif. AI dapat dengan mudah meniru gaya atau karya yang sudah ada melalui data pelatihan yang diolah, menimbulkan masalah hak cipta dan etika. Para pekerja kreatif di Indonesia dan di seluruh dunia telah menyuarakan kebutuhan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak cipta manusia dan memastikan transparansi dalam penggunaan data pelatihan AI.



Selain itu, tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah infrastruktur yang belum memadai dan rendahnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam teknologi AI. Tanpa regulasi dan pengamanan (safeguard) yang kuat, perkembangan AI bisa berdampak negatif, terutama jika AI mulai beroperasi tanpa memerlukan prompt atau arahan dari manusia, yang dapat memicu masalah besar di masa depan.

Kesalahan terbesar Indonesia adalah terlalu fokus pada teknologi AI tanpa mempersiapkan SDM yang mampu menguasai penggunaan AI. Padahal, pengembangan kapasitas SDM ini sangat penting untuk menghadapi disrupsi yang ditimbulkan oleh AI. Menurut Danar Juniarto (PIKAT Demokrasi), manusia tidak akan tergantikan oleh AI jika mereka dapat menguasai teknologi tersebut.

KESIMPULAN

AI telah membuka peluang besar bagi industri kreatif, namun juga menimbulkan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pekerja di sektor media dan konten digital perlu lebih siap menghadapi disrupsi teknologi ini. Dengan regulasi yang tepat, peningkatan keterampilan, dan perlindungan hak cipta yang kuat, Indonesia dapat memanfaatkan AI secara optimal tanpa merugikan para pekerja kreatif.

Di sisi lain, pemerintah perlu berkomitmen lebih serius dalam mendukung pengembangan AI, terutama dengan alokasi anggaran yang lebih memadai dan fokus pada peningkatan SDM. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat bergerak lebih maju dalam persaingan global, menjadikan AI sebagai alat bantu yang memperkuat, bukan menggantikan, peran manusia dalam industri kreatif.



Ruang Gagasan edisi "Akal Imitasi Mempercepat Disrupsi".
CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Rabu, 9 Oktober 2024



Ruang Gagasan edisi "Akal Imitasi Mempercepat Disrupsi".
CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Rabu, 9 Oktober 2024

REKOMENDASI

- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Indonesia perlu lebih banyak berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja agar mampu menguasai teknologi AI. Ini akan memastikan bahwa pekerja Indonesia tidak hanya menjadi konsumen AI, tetapi juga bagian dari pengembangannya.
- **Regulasi Perlindungan Tenaga Kerja:** Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang melindungi pekerja dari ancaman penggantian oleh AI. Regulasi ini harus mencakup perlindungan terhadap hak cipta, hak kerja, dan batasan penggunaan AI dalam industri kreatif.
- **Validasi Karya yang Dihasilkan AI:** Setiap karya yang dihasilkan oleh AI harus melalui validasi manusia untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau pelanggaran hak cipta. Ini juga membantu menjaga kualitas karya kreatif.
- **Anggaran Pengembangan AI yang Tepat Sasaran:** Anggaran untuk pengembangan AI di Indonesia harus digunakan secara efisien, tidak hanya untuk regulasi dan sosialisasi, tetapi juga untuk pengembangan teknologi yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi.
- **Peningkatan Literasi AI:** Pemerintah dan masyarakat harus lebih memahami potensi dan risiko AI melalui program literasi teknologi yang menyeluruh. Dengan begitu, Indonesia dapat memanfaatkan AI secara bijak dan etis.



Ruang Gagasan edisi "Akal Imitasi Mempercepat Disrupsi". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Rabu, 9 Oktober 2024

10. BONUS DEMOGRAFI INDONESIA: PELUANG EMAS ATAU ANCAMAN BENCANA

Indonesia tengah berada dalam fase penting sejarah kependudukannya yakni masa bonus demografi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), penduduk usia produktif (15–64 tahun) kini mencapai 69% dari total populasi. Artinya, setiap 100 penduduk, hanya 44 di antaranya yang termasuk kelompok usia tidak produktif (anak-anak dan lansia). Secara teoritis, ini adalah momentum emas yang hanya terjadi sekali dalam perjalanan bangsa—ketika tenaga kerja produktif melimpah dan potensi ekonomi mencapai puncaknya.

Prediksi BPS menunjukkan puncak bonus demografi akan berlangsung hingga tahun 2040 dengan proporsi usia produktif sekitar 66,08%. Namun, peluang ini tidak akan otomatis menjadi berkah. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, kesiapan industri, dan arah kebijakan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif.

Di sisi lain, struktur perekonomian Indonesia masih menghadapi perlambatan. Pertumbuhan ekonomi yang pada dekade 1980–1990-an mampu menembus rata-rata 7%, kini stagnan di kisaran 5% selama satu dekade terakhir. Sektor manufaktur yang dulunya menjadi motor utama penyerap tenaga kerja turun drastis dari 32% PDB (2002) menjadi hanya 18% pada 2022. Sementara itu, proporsi pekerja muda di sektor informal mencapai 44%, dengan mayoritas berpenghasilan rendah dan tidak memiliki jaminan sosial.

Secara nasional, tingkat pengangguran terbuka untuk usia 15–24 tahun masih berada di angka 16,16% (BPS, Februari 2025), jauh di atas rata-rata nasional 4,76%. Lebih dari 9 juta anak muda masuk kategori *Not in Education, Employment, or Training* (NEET). Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan serius antara potensi demografi dan realitas ekonomi. Jika tidak segera diatasi, potensi “bonus” justru bisa berubah menjadi beban sosial.

Namun, di balik tantangan tersebut, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk melompat. Generasi muda Indonesia termasuk generasi digital native terbesar di Asia Tenggara, dan 64% dari mereka aktif menggunakan internet untuk belajar dan berwirausaha. Hal ini menandakan potensi yang sangat besar untuk menggerakkan ekonomi digital, industri kreatif, dan sektor-sektor baru berbasis teknologi dan inovasi.

PARADOKS BONUS DEMOGRAFI

Paradoks dalam memanfaatkan bonus demografi terletak pada **ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri**.

Kurikulum di banyak sekolah dan perguruan tinggi masih terlalu teoritis dan belum mengikuti perkembangan ekonomi digital serta teknologi hijau. Akibatnya, banyak lulusan tidak siap kerja atau harus bekerja di luar bidang pendidikannya.

Selain itu, **dominan sektor informal** menjadi problem struktural. Sekitar 59% pekerja di Indonesia bekerja tanpa kontrak tetap, tanpa jaminan sosial, dan tanpa kepastian penghasilan. Kondisi ini menurunkan produktivitas nasional dan mempersempit peluang bagi generasi muda untuk naik kelas.

Tantangan lain adalah rendahnya akses modal dan ekosistem wirausaha muda. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), proporsi penerima dari kalangan muda masih di bawah 10%. Minimnya pendampingan dan mentoring bisnis membuat banyak inisiatif wirausaha berhenti di tahap awal.

Fenomena "Kabur Aja Dulu" yang viral di kalangan anak muda, yakni keinginan untuk bekerja di luar negeri, menjadi refleksi dari ketidakpercayaan mereka terhadap peluang karier di dalam negeri.

Di sisi kebijakan, masih terlihat **fragmentasi antar-lembaga**. Program untuk pengembangan tenaga kerja muda tersebar di berbagai kementerian (Kemnaker, Kemendikbudristek, Kemenpora, dan Bappenas), tetapi koordinasi lintas sektor belum optimal. Akibatnya, inisiatif seperti link and match industri-pendidikan masih berjalan parsial, bukan sistemik.

Selain tantangan ekonomi, Indonesia juga menghadapi ancaman ekologis. Perubahan iklim, bencana hidrometeorologi, dan degradasi lingkungan menambah tekanan terhadap produktivitas tenaga kerja muda, terutama di sektor pertanian dan pesisir. Dengan 9 juta pemuda bekerja di sektor pertanian dan perikanan, keberlanjutan lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga bonus demografi tetap produktif.

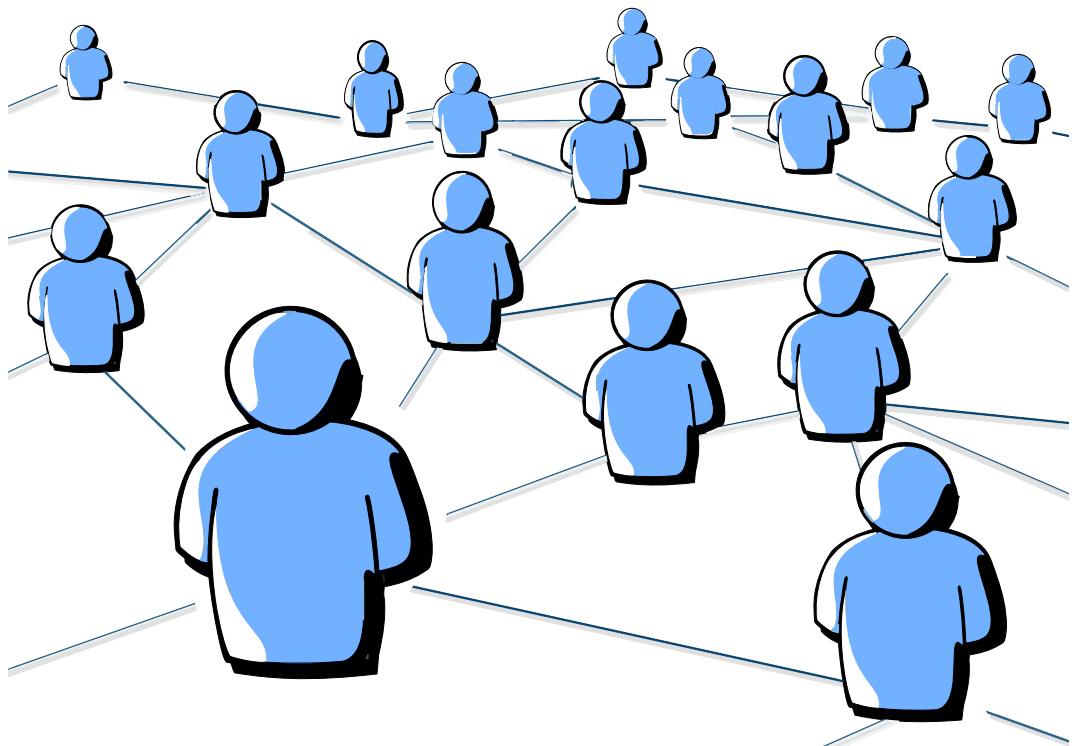


KESIMPULAN

Bonus demografi adalah momentum bersejarah yang tidak boleh disia-siakan. Indonesia memiliki keunggulan jumlah penduduk produktif yang besar, namun belum sepenuhnya diiringi dengan kualitas sumber daya manusia dan kesiapan industri yang memadai.

Jika dikelola dengan strategi yang tepat melalui pendidikan adaptif, lapangan kerja hijau, wirausaha muda yang kuat, dan kebijakan sosial yang inklusif, bonus demografi bisa menjadi bahan bakar utama menuju Indonesia Emas 2045. Sebaliknya, jika peluang ini diabaikan, Indonesia akan menghadapi ancaman middle-income trap dan tekanan sosial-ekonomi yang tinggi.

Ruang Gagasan 2025 menegaskan bahwa masa depan tidak menunggu. Generasi muda harus disiapkan bukan hanya untuk menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja, inovator, dan penjaga keberlanjutan. Bonus demografi bukan sekadar angka statistik namun momentum menentukan arah masa depan bangsa.



REKOMENDASI

- **Reformasi Pendidikan Adaptif dan Relevan.** Pemerintah perlu melakukan pembaruan kurikulum secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan industri masa depan, mulai dari sektor digital, energi terbarukan, hingga manufaktur modern. Pendidikan vokasi dan magang industri harus diperkuat agar lulusan memiliki keterampilan praktis. Program seperti Kampus Merdeka dan Startup Campus perlu diperluas agar menjangkau lebih banyak mahasiswa di daerah.
- **Penciptaan Lapangan Kerja Formal Berkualitas.** Perlu reindustrialisasi berbasis teknologi hijau (seperti kendaraan listrik, semikonduktor, dan energi terbarukan) untuk menyerap tenaga kerja muda terampil. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi industri yang mempekerjakan pemuda dengan upah layak dan jaminan sosial.
- **Penguatan Ekosistem Bisnis Muda.** Akses pembiayaan harus lebih inklusif. Program KUR Wirausaha Muda dengan bunga ≤3% dapat menjadi solusi jika dibarengi mentoring dan pendampingan. Pemerintah juga perlu menumbuhkan budaya wirausaha nasional dengan kampanye seperti “Mulai Aja Dulu” untuk menumbuhkan keberanian mengambil risiko di kalangan muda.
- **Kebijakan Upah, Perlindungan Sosial, dan Linkage UMKM–Usaha Besar.** Standarisasi upah berbasis kebutuhan hidup layak (KHL) dan perluasan jaminan sosial pekerja informal perlu diperkuat. Selain itu, perlu dibangun keterhubungan antara UMKM dan perusahaan besar agar tercipta rantai pasok yang saling menguntungkan, sekaligus membuka ruang kolaborasi inovatif.
- **Partisipasi Anak Muda dalam Perumusan Kebijakan.** Pemerintah perlu membentuk Youth Economic Forum sebagai kanal resmi komunikasi antara generasi muda dan pembuat kebijakan. Di saat bersamaan, literasi keuangan dan investasi perlu ditanamkan sejak bangku sekolah agar generasi muda memiliki kesiapan menghadapi transisi menuju masyarakat menua pasca-2040.



Ruang Gagasan edisi "Bonus Demografi Indonesia: Peluang Emas atau Ancaman Bencana". Tenku Cafe, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Rabu, 30 April 2025



Ruang Gagasan edisi "Bonus Demografi Indonesia: Peluang Emas atau Ancaman Bencana". Tenku Cafe, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Rabu, 30 April 2025



11. GIG ECONOMY: SOLUSI ATAU ILUSI?

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan besar akibat kemajuan teknologi digital. Munculnya platform daring seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Upwork melahirkan fenomena baru yang dikenal sebagai *gig economy* atau ekonomi berbasis kerja serabutan. Model ini memungkinkan individu bekerja secara fleksibel, berbasis proyek jangka pendek, tanpa ikatan kontrak formal. Bagi sebagian anak muda, sistem ini menawarkan kebebasan dan peluang penghasilan yang lebih cepat dibanding pekerjaan konvensional.

Namun, di balik daya tarik fleksibilitas, *gig economy* mencerminkan realitas lain: ketidakstabilan ekonomi, minimnya perlindungan sosial, dan meningkatnya ketimpangan kesejahteraan. Data BPS (2025) menunjukkan bahwa 59,4% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, artinya hanya empat dari sepuluh pekerja yang menikmati jaminan sosial dan upah tetap. Angka pengangguran tertinggi justru berada di kalangan muda usia 20–24 tahun, mencapai 33,5% dari total pengangguran nasional.

Fenomena ini semakin menonjol pasca pandemi, ketika banyak perusahaan melakukan efisiensi dan PHK massal. Bagi sebagian anak muda, bekerja sebagai mitra ojek daring, kurir logistik, freelancer digital, atau content creator menjadi jalan keluar sementara untuk bertahan hidup. Meski demikian, banyak yang belum menyadari bahwa sistem kerja fleksibel ini belum memberikan perlindungan jangka panjang yang memadai.

Dari perspektif ekonomi makro, *gig economy* sebenarnya merupakan refleksi dari transformasi struktural: perubahan dari ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis platform. Jika diarahkan dengan kebijakan yang tepat, sektor ini bisa menjadi ruang bagi inovasi dan penciptaan lapangan kerja baru di bidang teknologi, desain, dan jasa kreatif. Namun, jika dibiarkan tanpa regulasi, ia dapat menciptakan “generasi fleksibel” yang rentan secara sosial dan ekonomi.

KERJA FLEKSIBEL, HIDUP TAK STABIL

Tantangan utama *gig economy* terletak pada **kerentanan pekerja**. Sebagian besar pekerja gig berstatus "mitra" alih-alih karyawan, sehingga tidak memiliki hak atas jaminan sosial, cuti, atau pesangon. Mereka bekerja tanpa batas waktu yang jelas dan bergantung pada algoritma aplikasi untuk menentukan pendapatan. Ketika pesanan sepi atau kebijakan platform berubah, penghasilan mereka bisa turun drastis tanpa perlindungan hukum yang kuat.

Data BPJS Ketenagakerjaan (2025) mencatat hanya sebagian kecil mitra pengemudi platform logistik dan transportasi yang terdaftar dalam skema jaminan sosial. Padahal, risiko kerja di sektor ini sangat tinggi, mulai dari kecelakaan di jalan, biaya operasional kendaraan, hingga tekanan mental akibat jam kerja panjang.

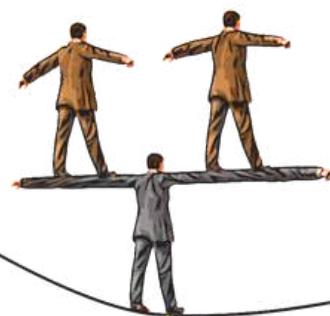
Selain itu, **tidak adanya standar pendapatan minimum** memperlebar kesenjangan antarpekerja. Banyak pekerja gig harus bekerja lebih dari 10 jam per hari untuk sekadar mencapai penghasilan setara UMR. Fenomena ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas yang dijanjikan sering kali berubah menjadi bentuk baru dari eksloitasi digital.

Dari sisi kebijakan, regulasi nasional belum sepenuhnya mampu menjangkau karakter gig economy.

Status hukum pekerja yang ambigu bukan karyawan, tapi juga bukan wirausaha mandiri penuh sehingga membuat mereka tidak tercover oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan secara utuh. Belum ada lembaga resmi yang secara khusus mewadahi aspirasi atau perlindungan hukum bagi pekerja platform.

Selain itu, **kesenjangan digital dan literasi keuangan** juga menjadi hambatan besar. Banyak pekerja gig muda belum memahami cara mengelola penghasilan, menabung, atau berinvestasi untuk masa depan. Di sisi lain, platform digital masih cenderung berorientasi pada efisiensi dan ekspansi pasar ketimbang kesejahteraan mitranya.

Selain itu, **kesenjangan digital dan literasi keuangan** juga menjadi hambatan besar. Banyak pekerja gig muda belum memahami cara mengelola penghasilan, menabung, atau berinvestasi untuk masa depan. Di sisi lain, platform digital masih cenderung berorientasi pada efisiensi dan ekspansi pasar ketimbang kesejahteraan mitranya.

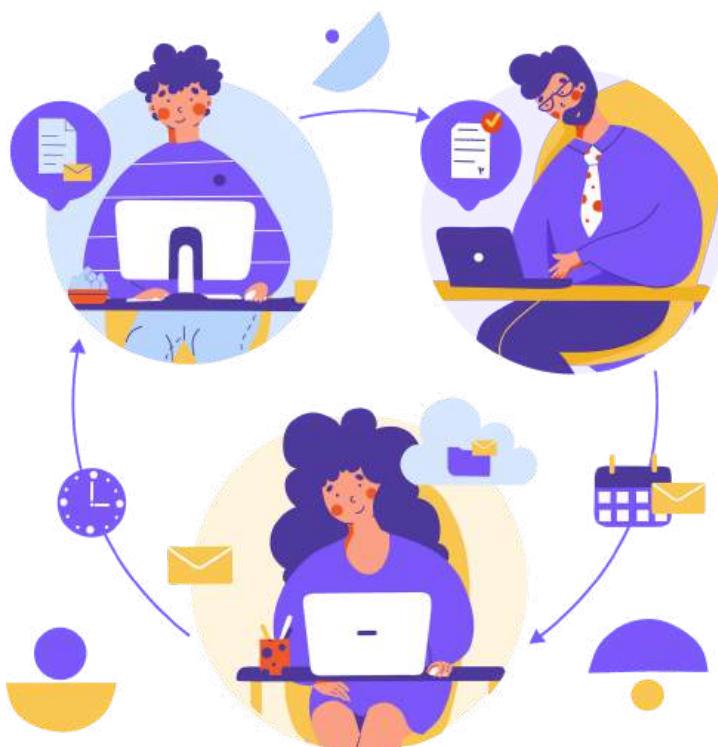


KESIMPULAN

Gig economy bukan semata-mata fenomena teknologi, melainkan cerminan dari perubahan struktural dunia kerja yang fundamental. Ia menawarkan peluang besar bagi generasi muda untuk bekerja fleksibel dan mandiri, tetapi juga membawa risiko sosial yang tidak kecil.

Hasil diskusi Ruang Gagasan 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar anak muda melihat *gig economy* sebagai jalan awal bukan tujuan akhir menuju kemandirian ekonomi. Namun agar sektor ini berkelanjutan, dibutuhkan keberpihakan kebijakan dan perlindungan sosial yang kuat.

Dengan regulasi yang adaptif, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas pekerja, *gig economy* dapat menjadi ruang transisi menuju ekonomi masa depan yang lebih inklusif dan manusiawi. Indonesia tidak perlu memilih antara fleksibilitas atau keamanan keduanya dapat berjalan seiring dalam kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan.



REKOMENDASI

- **Perlindungan Sosial Minimum bagi Pekerja Gig.** Pemerintah bersama perusahaan platform perlu menyusun skema jaminan sosial hibrida, di mana kontribusi dibagi antara pekerja dan platform. Asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan dana pensiun dasar wajib diberikan, setidaknya melalui skema iuran mikro yang disubsidi sebagian.
- **Regulasi Hukum yang Adaptif.** Perlu diterbitkan payung hukum nasional yang mendefinisikan status pekerja gig secara jelas bukan sekadar "mitra", tetapi "pekerja mandiri terlindungi" (*protected self-employed*). Regulasi ini harus mengatur standar jam kerja, transparansi algoritma, dan mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan platform.
- **Peningkatan Kapasitas dan Upskilling.** Program pelatihan digital dan sertifikasi kompetensi perlu diperluas agar pekerja gig dapat meningkatkan daya saing dan beralih ke sektor formal atau menjadi wirausahawan mandiri. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas untuk menyediakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar lokal.
- **Insentif bagi Platform yang Ramah Pekerja.** Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau pengakuan publik bagi perusahaan digital yang menerapkan prinsip *decent work*, seperti jaminan sosial, transparansi algoritma, dan pengelolaan data etis.
- **Pembentukan Lembaga Representatif Pekerja Gig.** Diperlukan wadah resmi seperti Asosiasi Pekerja Platform Indonesia (APPI) yang berfungsi mengadvokasi hak pekerja gig, mengumpulkan data kesejahteraan, dan menjembatani dialog dengan regulator serta perusahaan.





Ruang Gagasan edisi "Gig Economy: Solusi atau Ilusi?". Tenku Cafe, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Rabu, 28 Mei 2025



Ruang Gagasan edisi "Gig Economy: Solusi atau Ilusi?". Tenku Cafe, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Rabu, 28 Mei 2025



12. INDONESIA DARURAT SAMPAH: KITA HARUS APA?

Indonesia sedang menghadapi krisis lingkungan yang nyata yakni **darurat sampah**. Volume sampah nasional meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang semakin urban dan instan. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN, 2025), timbulan sampah Indonesia mencapai 34,2 juta ton per tahun, namun hanya 59,7% yang berhasil dikelola oleh pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, hanya 9,5% yang berhasil didaur ulang.

Krisis ini diperburuk oleh perubahan gaya hidup konsumtif dan masih minimnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, terutama di daerah-daerah. Mayoritas sampah berasal dari rumah tangga (53,74%), disusul pasar tradisional (14,48%), kawasan permukiman (11,95%), dan perniagaan (10,49%). Komposisi terbesar berasal dari sisa makanan (39,36%) dan sampah plastik (19,73%), dua jenis limbah yang berdampak besar terhadap lingkungan.

Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil sampah terbesar di ASEAN, dengan volume sampah plastik mencapai **14,7 juta ton per tahun (UNEP, 2024)**.

Jika tidak dikelola dengan serius, proyeksi Bank Dunia memperkirakan volume sampah di Indonesia dapat meningkat hingga 70 juta ton per tahun pada 2040.

Masalah sampah tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang besar. Studi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023) memperkirakan kerugian ekonomi akibat pencemaran plastik laut mencapai lebih dari US\$450 juta per tahun, termasuk pada sektor perikanan dan pariwisata. Krisis ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar urusan kebersihan, melainkan persoalan pembangunan berkelanjutan yang mempengaruhi kesehatan, ekonomi, dan masa depan generasi muda.



BUTUH PENANGANGAN STRUKTURAL DAN SISTEMIK

Masalah utama dalam penanganan sampah di Indonesia bersifat struktural dan sistemik. Pertama, infrastruktur pengelolaan sampah belum merata. Banyak daerah masih mengandalkan sistem pengumpulan sederhana yakni sampah dikumpulkan, diangkut, lalu dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa proses daur ulang. Hanya sebagian kecil wilayah seperti Surabaya, Banyumas, dan Balikpapan yang memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan pendekatan *reduce, reuse, recycle* (3R).

Kedua, keterbatasan teknologi daur ulang dan insentif ekonomi membuat industri pengolahan sampah sulit berkembang. Produk berbahan plastik baru masih lebih murah dibanding plastik daur ulang, sehingga pelaku *circular economy* sulit bersaing di pasar. Para pekerja sektor informal seperti pemulung, pengepul, dan pengrajin daur ulang belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan sosial, padahal mereka merupakan tulang punggung daur ulang nasional.

Ketiga, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat memperburuk situasi. Berdasarkan survei Kementerian LHK (2024), hanya 27% rumah tangga yang secara konsisten memilah sampah organik dan anorganik. Di sisi lain, praktik membakar sampah secara terbuka masih dilakukan di lebih dari 60% desa dan kota kecil, menyebabkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca.

Selain faktor teknis, ada pula tantangan dari sisi kebijakan. Regulasi pengelolaan sampah memang sudah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008, namun implementasinya masih lemah. Banyak daerah belum memiliki *roadmap* pengelolaan sampah yang jelas, dan koordinasi lintas kementerian masih terfragmentasi. Akibatnya, kebijakan nasional tentang ekonomi sirkular belum sepenuhnya terwujud di tingkat lokal.



KESIMPULAN

Indonesia berada di persimpangan antara krisis dan peluang. Di satu sisi, volume sampah yang terus meningkat mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola lingkungan. Namun di sisi lain, terdapat potensi ekonomi besar dari sampah jika dikelola dengan pendekatan sirkular.

Pengalaman dari Banyumas, Margalarva, dan Kertabumi membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan swasta dapat menghasilkan solusi nyata, seperti terciptanya lapangan kerja hijau, mengurangi emisi, dan menumbuhkan kesadaran publik.

Diskusi Ruang Gagasan 2025 menegaskan bahwa perubahan besar harus dimulai dari tindakan kecil dan konsisten seperti memilah, mendaur, dan menolak sampah berlebih. Dengan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, ekonomi sirkular dapat menjadi jalan bagi Indonesia untuk keluar dari krisis sampah dan bergerak menuju masa depan yang lebih bersih, tangguh, dan hijau.



REKOMENDASI

- **Bangun Ekosistem Pengelolaan Sampah Terpadu.** Pemerintah daerah perlu memperluas pembangunan TPST dan memperkuat infrastruktur material *recovery facility* (MRF) di tingkat komunitas. Contoh keberhasilan dapat dilihat di Kabupaten Banyumas, yang telah membangun 23 TPST dengan hasil 98% sampah terkelola dan tingkat daur ulang mencapai 81,5% (Mongabay, 2024). Model Banyumas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan berbasis komunitas bisa efektif jika disertai dukungan regulasi dan insentif.
- **Dorong Insentif Ekonomi untuk Daur Ulang dan Inovasi.** Pemerintah dapat memperluas skema green financing dan memberikan potongan pajak bagi industri yang menggunakan bahan daur ulang. Selain itu, subsidi harga bagi produk recycled plastic perlu dipertimbangkan agar kompetitif terhadap plastik baru. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas sangat penting dalam menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Lingkungan.** Gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga harus menjadi prioritas nasional. Program seperti Satu Rumah Satu Komposter atau Bank Sampah Sekolah perlu diperluas dengan dukungan media sosial dan kampanye publik. Generasi muda dapat menjadi penggerak melalui eco-challenge atau lomba inovasi pengelolaan sampah berbasis digital.
- **Pemberdayaan Sektor Informal dan Komunitas Daur Ulang.** Pemerintah perlu mengakui dan mendukung peran pemulung dan pelaku circular economy informal dengan memberikan akses BPJS, pelatihan keselamatan kerja, dan bantuan alat pengolahan. Kolaborasi lintas komunitas seperti Margalarva di Tangerang dan Kertabumi di Jakarta dapat menjadi model penguatan ekonomi lokal berbasis sampah organik.
- **Membangun Roadmap Ekonomi Sirkular Nasional.** Strategi jangka panjang perlu dirumuskan melalui roadmap pengelolaan sampah nasional yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peta jalan ini harus menetapkan target daur ulang minimal 30% dan pengurangan sampah hingga 70% pada 2040, sejalan dengan komitmen Indonesia's National Plastic Action Partnership (NPAP).



Ruang Gagasan edisi "Indonesia Darurat Sampah: Kita Harus Apa?". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 26 Juni 2025



Ruang Gagasan edisi "Indonesia Darurat Sampah: Kita Harus Apa?". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 26 Juni 2025



13. ZERO EMISSION: AKSI HARI INI, INVESTASI MASA DEPAN

Isu perubahan iklim kini menjadi tantangan paling mendesak abad ini. Pemanasan global yang terus meningkat mengancam tidak hanya lingkungan, tetapi juga stabilitas ekonomi dan sosial dunia. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2023) menunjukkan bahwa suhu rata-rata bumi telah meningkat sekitar 1,2°C dibandingkan masa pra-industri. Jika tidak ada langkah nyata, dunia akan melampaui ambang batas aman 1,5°C hanya dalam waktu dua dekade ke depan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan rumah bagi 17 ribu pulau berada di garis depan risiko perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut, kekeringan ekstrem, dan bencana hidrometeorologi kini menjadi ancaman nyata. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2024), sekitar 55% emisi nasional berasal dari sektor energi, disusul industri, transportasi, dan rumah tangga. Pemerintah telah menegaskan komitmennya melalui *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk menurunkan emisi sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030, serta mencapai *net-zero emission* (NZE) paling lambat pada 2060.

Namun, target ambisius ini bukan sekadar agenda lingkungan. Transisi menuju ekonomi rendah karbon adalah peluang strategis untuk membangun model ekonomi baru yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari tenaga surya (lebih dari 200 GWp), tenaga air (75 GW), panas bumi (23 GW), hingga bioenergi. Jika dikelola secara serius, potensi ini dapat menggantikan ketergantungan pada batu bara yang selama ini menjadi sumber utama listrik nasional.

Generasi muda memegang peran penting dalam transisi ini. Mereka bukan hanya korban dampak perubahan iklim, tetapi juga agen perubahan yang mampu mendorong inovasi dan gaya hidup rendah emisi. Melalui gerakan Ruang Gagasan 2025, para peserta menunjukkan bahwa aksi lingkungan tidak harus menunggu kebijakan besar ia bisa dimulai dari kesadaran individu, komunitas, dan pelaku usaha lokal.

TANTANGAN MENUJU NET-ZERO EMISSION

Meskipun komitmen menuju *net-zero emission* telah jelas, tantangan implementasinya masih sangat besar. Pertama, **ketergantungan tinggi pada energi fosil**. Lebih dari 60% listrik Indonesia masih berasal dari batu bara, sementara porsi energi terbarukan dalam bauran nasional baru mencapai 14% pada 2024 (IESR, 2024). Proyek-proyek energi bersih seringkali terkendala masalah investasi, perizinan, dan koordinasi lintas sektor.

Kedua, **kebutuhan investasi hijau yang sangat besar**. World Bank (2023) memperkirakan Indonesia memerlukan dana antara USD 200–250 miliar hingga 2030 untuk mencapai target transisi energi bersih. Namun, realisasi investasi hijau masih di bawah 15% dari kebutuhan tahunan. Rendahnya minat investor disebabkan oleh ketidakpastian regulasi, minimnya insentif, dan belum optimalnya instrumen keuangan hijau seperti *green bonds* dan *carbon trading*.

Ketiga, **rendahnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup rendah karbon**. Survei UNEP (2023) menunjukkan bahwa hanya 23% masyarakat Indonesia yang memahami konsep emisi karbon dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Pola konsumsi energi yang boros, ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta budaya konsumsi sekali pakai masih sangat kuat di perkotaan.

Selain itu, **aspek keadilan transisi (just transition)** juga menjadi tantangan penting. Ribuan pekerja di sektor tambang batu bara dan energi fosil menghadapi ketidakpastian pekerjaan. Jika transisi energi tidak dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial, maka kebijakan hijau justru dapat menimbulkan resistensi ekonomi di daerah penghasil energi konvensional seperti Kalimantan dan Sumatera.

Koordinasi lintas sektor pun masih lemah. Kebijakan energi, industri, dan lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi. Upaya menuju *net-zero* seringkali berhenti di tataran dokumen, bukan implementasi di lapangan. Tanpa tata kelola yang kuat, target 2060 akan sulit tercapai.

KESIMPULAN

Perjalanan menuju *net-zero emission* adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Meskipun jalan yang ditempuh tidak mudah, setiap langkah kecil yang dilakukan dalam menghemat energi, beralih ke kendaraan listrik, mendaur ulang, atau memilih produk berkelanjutan merupakan kontribusi nyata bagi bumi.

Indonesia memiliki semua modal yang dibutuhkan seperti potensi energi bersih yang melimpah, sumber daya manusia muda yang inovatif, dan momentum global menuju ekonomi hijau. Tantangannya kini bukan apakah kita bisa, tetapi apakah kita mau bergerak cukup cepat.

Diskusi Ruang Gagasan 2025 menegaskan bahwa aksi hari ini adalah investasi masa depan. Setiap kebijakan hijau yang diambil sekarang akan menentukan kualitas hidup generasi mendatang. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan generasi muda, target *net-zero emission* bukan lagi mimpi jauh, melainkan perjalanan bersama menuju masa depan Indonesia yang hijau, tangguh, dan berdaya saing global.



REKOMENDASI

- **Bangun Ekosistem Pengelolaan Sampah Terpadu.** Pemerintah daerah perlu memperluas pembangunan TPST dan memperkuat infrastruktur *material recovery facility* (MRF) di tingkat komunitas. Contoh keberhasilan dapat dilihat di Kabupaten Banyumas, yang telah membangun 23 TPST dengan hasil 98% sampah terkelola dan tingkat daur ulang mencapai 81,5% (Mongabay, 2024). Model Banyumas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan berbasis komunitas bisa efektif jika disertai dukungan regulasi dan insentif.
- **Dorong Insentif Ekonomi untuk Daur Ulang dan Inovasi.** Pemerintah dapat memperluas skema *green financing* dan memberikan potongan pajak bagi industri yang menggunakan bahan daur ulang. Selain itu, subsidi harga bagi produk *recycled plastic* perlu dipertimbangkan agar kompetitif terhadap plastik baru. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas sangat penting dalam menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan.
- **Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Lingkungan.** Gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga harus menjadi prioritas nasional. Program seperti Satu Rumah Satu Komposter atau

Bank Sampah Sekolah perlu diperluas dengan dukungan media sosial dan kampanye publik. Generasi muda dapat menjadi penggerak melalui *eco-challenge* atau lomba inovasi pengelolaan sampah berbasis digital.

- **Pemberdayaan Sektor Informal dan Komunitas Daur Ulang.** Pemerintah perlu mengakui dan mendukung peran pemulung dan pelaku circular economy informal dengan memberikan akses BPJS, pelatihan keselamatan kerja, dan bantuan alat pengolahan. Kolaborasi lintas komunitas seperti Margalarva di Tangerang dan Kertabumi di Jakarta dapat menjadi model penguatan ekonomi lokal berbasis sampah organik.
- **Membangun Roadmap Ekonomi Sirkular Nasional.** Strategi jangka panjang perlu dirumuskan melalui *roadmap* pengelolaan sampah nasional yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peta jalan ini harus menetapkan target daur ulang minimal 30% dan pengurangan sampah hingga 70% pada 2040, sejalan dengan komitmen Indonesia's National Plastic Action Partnership (NPAP).



Ruang Gagasan edisi "Zero Emission: Aksi Hari Ini, Investasi Masa Depan". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 31 Juli 2025



Ruang Gagasan edisi "Zero Emission: Aksi Hari Ini, Investasi Masa Depan". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 31 Juli 2025



14. RAYAKAN KEMERDEKAAN, RAIH PELUANG GLOBAL

Memasuki usia ke-80 tahun kemerdekaan, Indonesia telah menempuh perjalanan panjang sebagai bangsa yang berdaulat. Namun, di tengah kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi, pekerjaan rumah masih menumpuk. Kemiskinan, pengangguran, serta terbatasnya lapangan kerja layak masih menjadi masalah nyata bagi jutaan warga, terutama generasi muda.

Menurut Ekonom CORE Indonesia, **Hendri Saparini, Ph.D** dalam pidato sambutan acara Ruang Gagasan Edisi 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia, generasi muda merupakan penentu arah masa depan bangsa. Jika produktivitas mereka, baik yang sedang menempuh pendidikan tinggi maupun yang belum berkesempatan, dapat dioptimalkan, maka peluang Indonesia naik kelas menjadi negara maju akan semakin besar. Kemerdekaan sejati bukan hanya tentang lepas dari penjajahan, tetapi **kebebasan dari kemiskinan dan ketergantungan ekonomi**.

Pada saat yang sama, globalisasi membuka ruang baru bagi pendidikan dan kolaborasi lintas negara. Menurut UNESCO (2025), lebih dari 6,9 juta mahasiswa di seluruh dunia menempuh studi di luar negeri, meningkat signifikan

dibandingkan satu dekade sebelumnya. Dari Indonesia, tercatat 9.951 penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dengan 290 orang di antaranya belajar di luar negeri (Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, 2024). Data ini menandakan bahwa generasi muda Indonesia mulai terhubung dengan arus globalisasi pendidikan, memperluas wawasan, membangun jejaring, dan memperkuat kapasitas untuk bersaing di tingkat dunia.

Kemerdekaan hari ini bukan lagi soal perjuangan fisik, melainkan **kemampuan intelektual dan kolaboratif untuk berkontribusi dalam ekonomi global**. Generasi muda dituntut untuk mengubah semangat merdeka menjadi dorongan untuk belajar lintas batas, mengasah keterampilan masa depan, dan menghadirkan nilai bagi bangsa.

ANTARA KEMERDEKAAN DAN KESIAPAN GLOBAL

Meski peluang terbuka lebar, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi agar kemerdekaan benar-benar bermakna dalam konteks global. **Pertama, kesenjangan kualitas sumber daya manusia.**

Menurut laporan World Economic Forum (2023), keterampilan masa depan (*future skills*) seperti berpikir analitis, kreativitas, ketahanan, fleksibilitas, empati, dan literasi teknologi menjadi syarat utama di dunia kerja. Namun, sebagian besar tenaga kerja muda Indonesia belum menguasai keterampilan tersebut. Banyak institusi pendidikan masih berorientasi pada hafalan, bukan pengembangan daya analitis dan *problem solving*.

Kedua, keterbatasan akses pendidikan global. Meskipun jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri meningkat, proporsinya masih kecil dibanding negara ASEAN lain.

Menurut GoodStats (2024), Indonesia menempati posisi kedua di Asia Tenggara dalam jumlah mahasiswa yang belajar di luar negeri, tetapi masih tertinggal dalam program pertukaran riset dan kemitraan akademik jangka panjang.

Ketiga, kesiapan menghadapi tantangan lintas budaya dan ekonomi. Pengalaman mahasiswa Indonesia di Rusia, Tiongkok, dan India

menggambarkan bahwa belajar di luar negeri menuntut adaptasi yang tinggi terhadap bahasa, cuaca, sistem pendidikan, dan kultur kerja. Di Rusia, ketahanan dan disiplin menjadi kunci; di Tiongkok, kemampuan mengikuti ritme studi yang cepat; sementara di India, ketangguhan mental dan kemampuan beradaptasi sosial menjadi faktor utama.

Keempat, rendahnya kapasitas soft skills dan jejaring internasional.

Banyak anak muda masih belum melihat pentingnya kepemimpinan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi global. Padahal, keterampilan inilah yang membedakan antara tenaga kerja yang adaptif dan yang mudah tergantikan.

KESIMPULAN

Delapan dekade setelah kemerdekaan, Indonesia telah menempuh jalan panjang menuju kemandirian. Namun, kemerdekaan sejati tidak cukup hanya dirayakan, ia harus diwujudkan dalam bentuk kapasitas, keberanian, dan kontribusi nyata di panggung global.

Generasi muda Indonesia kini memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap pendidikan, teknologi, dan kolaborasi internasional. Mereka dituntut untuk menyiapkan diri dengan keterampilan global, kepemimpinan lintas budaya, dan jiwa merdeka yang bebas dari ketergantungan, berani berinovasi, dan berkomitmen membangun bangsa.

Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber lainnya **Ario Bayu Wicaksono** (Aktor, Globe Theater London), *“Show our value first, and the world will take a look to citizenship.”* Dunia tidak menunggu Indonesia untuk siap, dunia menunggu generasi muda Indonesia untuk menunjukkan nilainya.

Peringatan 80 tahun kemerdekaan menjadi momentum refleksi — bahwa **kemerdekaan di abad ke-21 adalah kemerdekaan untuk berpikir luas, bertindak global, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.**



Aini Purwo Yulia
Lulusan University of Lucknow, India.



Gisella Nofenna
Mahasiswa Zhejiang University



Erland Paruski
Alumni Moscow University Touro



Ario Bayu Wicaksono
Aktor sekaligus Ketua Komite Festival Film Indo



Amy Maulana, Ph.D
Peneliti di Volgograd State University



Enta Fadila Tapisa
Alumni University of Glasgow



REKOMENDASI

- **Kembangkan Soft Skills dan Literasi Global.** Generasi muda harus membekali diri dengan keterampilan abad ke-21 seperti kemampuan berpikir analitis, kreatif, empatik, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan. Laporan Future of Jobs 2023 (World Economic Forum) menegaskan bahwa kemampuan analitis dan kreatif menjadi dua keterampilan paling penting di masa depan. Pemerintah dan kampus perlu memperkuat pelatihan soft skills ini melalui kurikulum interdisipliner, program pertukaran, dan kolaborasi lintas negara.
- **Perluas Akses Pendidikan Internasional dan Diplomasi Akademik.** Program seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan BRICS Scholarship perlu diperluas agar lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan riset nasional. Kolaborasi pendidikan Indonesia dengan negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Rusia juga harus diarahkan pada penguatan riset teknologi, sains, dan ekonomi kreatif.
- **Bangun Ekosistem Alumni Global.** Alumni Indonesia di luar negeri dapat menjadi duta pengetahuan dan jembatan diplomasi ekonomi. Melalui jejaring alumni Rusia, Tiongkok, dan India, kolaborasi riset strategis dapat diperluas,

terutama dalam bidang energi, data, dan teknologi digital. Seperti disampaikan oleh salah satu narasumber Ruang Gagasan Amy Maulana, Ph.D (Peneliti Volgograd State University), keanggotaan Indonesia di BRICS perlu dimanfaatkan untuk membangun pusat riset bersama dan pertukaran talenta strategis.

- **Dorong Kemandirian dan Kolaborasi Kreatif Anak Muda.** Kemandirian finansial dan mental perlu dibangun sejak dini agar generasi muda tidak hanya bergantung pada sistem kerja formal. Dukungan terhadap startup, wirausaha sosial, dan inisiatif kolaboratif lintas negara akan memperluas peran Indonesia dalam rantai nilai global.
- **Perkuat Diplomasi Pendidikan dan Budaya.** Keterlibatan anak muda dalam forum-forum global seperti ASEAN Youth Forum, BRICS Youth Summit, dan Youth20 harus difasilitasi sebagai bagian dari strategi diplomasi generasi baru. Diplomasi pendidikan bukan hanya memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, tetapi juga menanamkan kepercayaan diri bahwa anak muda Indonesia mampu bersaing secara setara di panggung global.



Ruang Gagasan edisi "Rayakan Kemerdekaan, Raih Peluang Global". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 14 Agustus 2025



Ruang Gagasan edisi "Rayakan Kemerdekaan, Raih Peluang Global". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 14 Agustus 2025



14. CULTURE MEETS MARKET

Budaya telah menjadi sumber inspirasi dan daya tahan bangsa Indonesia. Dengan lebih dari 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah (BPS, 2024), Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa mulai dari tradisi, kuliner, fesyen, hingga ekspresi kreatif kontemporer. Dalam konteks pembangunan ekonomi, budaya tidak lagi hanya dianggap sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai penggerak utama ekonomi kreatif dan diplomasi global.

Kolaborasi antara CORE Indonesia dan Urban Culture Lab, Tokyo City University (TCU) memperkuat arah baru ini dengan menempatkan budaya sebagai pendorong penguatan UMKM Indonesia di pasar global, khususnya Jepang. Dari total 59,5 juta unit UMKM, sekitar 50,7% bergerak di sektor non-agrikultur, sementara 49,3% di sektor pertanian dan perikanan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Mayoritas berada pada skala mikro, yang menggambarkan struktur ekonomi nasional yang masih sangat bergantung pada usaha kecil.

Keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar menjadi penghambat utama pertumbuhan. Meski UMKM menyerap hampir 96,7% tenaga kerja nasional (BPS, 2023), kontribusi mereka terhadap ekspor masih rendah dan didominasi oleh komoditas mentah seperti batu bara, LNG, dan nikel (Trademap, 2024). Dalam situasi ini, budaya dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mengubah komoditas menjadi produk bernilai tambah tinggi misalnya melalui desain, estetika, atau narasi budaya yang kuat.

Melalui pendekatan *Culture Meets Market*, CORE Indonesia dan TCU berupaya menunjukkan bahwa identitas lokal dapat bersinergi dengan preferensi global, melahirkan produk yang tidak hanya laku di pasar, tetapi juga merepresentasikan karakter bangsa.

TANTANGAN MENGHUBUNGKAN BUDAYA DENGAN PASAR GLOBAL

Pertama, masih terdapat kesenjangan antara potensi kreatif lokal dan kemampuan untuk menembus pasar internasional. Sebagian besar UMKM beroperasi dengan kapasitas terbatas dan literasi digital yang rendah. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2021) menunjukkan bahwa hanya 18% dari total 64,2 juta UMKM yang sudah terhubung dengan platform digital. Rendahnya pemahaman terhadap estetika global dan tren pasar internasional menyebabkan banyak produk lokal kesulitan bersaing.

Kedua, keterbatasan desain, inovasi, dan pemahaman lintas budaya juga menjadi kendala. Budaya populer Jepang, misalnya, dikenal melalui fenomena **“cute economy” (kawaii)** yang menekankan estetika menyenangkan, lembut, dan emosional. Ukuran pasar ritel produk kawaii di Jepang mencapai ¥250 miliar menurut salah satu narasumber Ruang Gagasan Prof Drianda (Dosen Tokyo City University), sementara sub-sektor seperti bath bomb tumbuh dari USD 12 juta (2020) menjadi USD 20,7 juta (2025) dan diproyeksikan mencapai USD 32,7 juta (2030) (TCU Presentation, 2025). UMKM Indonesia belum sepenuhnya siap untuk menyesuaikan desain produk mereka dengan selera pasar Jepang.

Ketiga, banyak pelaku UMKM belum memiliki sertifikasi dan standar mutu internasional seperti BPOM, ISO, atau halal global, yang menjadi prasyarat utama masuk ke pasar Jepang dan Eropa. Hambatan administratif ini sering kali membuat UMKM berhenti di pasar domestik.

Keempat, persoalan keberlanjutan budaya (*cultural sustainability*) juga perlu diwaspadai. Komersialisasi budaya tanpa pemahaman nilai-nilai lokal dapat menimbulkan distorsi makna dan mengikis autentisitas. Oleh karena itu, inovasi budaya harus dijalankan dengan prinsip etika, partisipasi komunitas, dan pelestarian nilai.



KESIMPULAN

Kolaborasi CORE Indonesia dan Urban Culture Lab TCU membuktikan bahwa **budaya dapat menjadi pintu masuk strategis bagi UMKM Indonesia menuju pasar global**. Dalam konteks hubungan Indonesia–Jepang, pendekatan lintas budaya bukan hanya memperluas peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat diplomasi antarbangsa.

Tantangan seperti keterbatasan digitalisasi, literasi pasar global, dan sertifikasi tidak harus menjadi hambatan permanen. Dengan pendekatan yang sistematis seperti pelatihan, riset kolaboratif, dan inovasi produk berbasis nilai budaya, UMKM Indonesia dapat bertransformasi menjadi pelaku ekonomi kreatif kelas dunia.

Bagi generasi muda, *Culture Meets Market* adalah ajakan untuk menjadikan budaya bukan hanya warisan yang dijaga, tetapi kekuatan yang diolah menjadi nilai ekonomi dan diplomasi. Dengan kemampuan membaca tren global dan mengaitkannya dengan identitas lokal, anak muda Indonesia dapat menjadi wajah baru ekonomi kreatif dunia yang inovatif, berakar, dan berdaya saing global.



REKOMENDASI

- **Budaya sebagai Motor Ekonomi Kreatif Baru.** Pemerintah dan lembaga riset perlu memperluas pendekatan ekonomi kreatif berbasis budaya sebagai bagian dari diplomasi ekonomi. Kolaborasi CORE Indonesia–TCU menjadi contoh bagaimana riset akademik, industri, dan komunitas dapat bersatu untuk memperluas daya saing UMKM ke pasar global, khususnya melalui produk yang menggabungkan nilai estetika Jepang dan kekayaan alam Indonesia.
- **Adaptasi Budaya Lokal ke Pasar Global (Cute Economy).** Pelaku UMKM perlu memahami karakter pasar Jepang yang berorientasi pada keindahan, kesederhanaan, dan emosi positif. Produk yang dirancang oleh mahasiswa TCU dan dipresentasikan pada acara Ruang Gagasan 2025 seperti **Saltara Bath Bomb**, yang mengadaptasi konsep purifikasi air Nusantara dengan bahan alami, serta **WANTIK Pet Clothes**, yang memadukan motif batik dengan fesyen hewan peliharaan, menjadi contoh konkret bagaimana kearifan lokal bisa bertransformasi menjadi produk bernilai ekspor.
- **Penguatan Literasi dan Sertifikasi UMKM.** Pemerintah perlu memperkuat program pelatihan estetika lintas budaya (misalnya kawaii, wabi-sabi, dan iki)

serta memastikan pelaku usaha memperoleh sertifikasi internasional. Standar mutu dan keamanan seperti BPOM, ISO, dan eco-label akan menjadi nilai tambah di pasar Jepang yang sangat ketat terhadap kualitas.

- **Digitalisasi dan Platform Lintas Budaya.** Tahap menengah dari strategi ini adalah membangun **platform digital lintas budaya** yang mempertemukan pelaku UMKM Indonesia dan komunitas kreatif Jepang. Platform ini dapat berfungsi sebagai *virtual market testing* serta media promosi bagi produk budaya, fesyen, dan gaya hidup.
- **Kemitraan Berkelanjutan dan Diplomasi Pemuda.** Saat ini Ruang Gagasan telah menciptakan forum kolaborasi antara Mahasiswa TCU dan UMKM Indonesia dalam mengembangkan produk berciri khas Indonesia yang dipadukan dengan tren pasar Jepang. Pada jangka panjang, perlu dibangun kemitraan berkelanjutan antara UMKM, lembaga penelitian seperti CORE Indonesia, dan perguruan tinggi seperti Tokyo City University. Program pertukaran pemuda, *creative residency*, serta riset bersama akan memperkuat jejaring ekonomi budaya lintas negara sekaligus membuka akses UMKM ke rantai pasok global.



Ruang Gagasan edisi "Rayakan Kemerdekaan, Raih Peluang Global". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 14 Agustus 2025



Ruang Gagasan edisi "Rayakan Kemerdekaan, Raih Peluang Global". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 14 Agustus 2025



14. FROM CULTURE TO FUTURE: MEMBANGUN EKONOMI BERBASIS WARISAN BUDAYA

Warisan budaya bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga sumber inspirasi dan nilai ekonomi yang dapat memperkuat daya saing nasional. Jepang telah membuktikan hal tersebut dengan menjadikan kebudayaan sebagai landasan pembangunan ekonomi dan diplomasi global. Mulai dari konsep *wabi-sabi* yang mengajarkan kesederhanaan estetis hingga gaya hidup *omotenashi* yang menekankan pelayanan penuh ketulusan, budaya lokal di Jepang berhasil bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang mendunia.

Indonesia sesungguhnya memiliki potensi serupa. Dengan ribuan tradisi, naskah kuno, dan warisan budaya takbenda, negeri ini menyimpan sumber pengetahuan, etika, dan estetika yang sangat kaya. Namun, realitas pembangunan di Indonesia masih menunjukkan bahwa kebudayaan belum sepenuhnya menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional. Orientasi pembangunan yang berfokus pada fisik dan infrastruktur sering kali meminggirkan dimensi kultural sebagai fondasi nilai dan kreativitas.

Persoalan inilah yang diangkat dalam diskusi bertajuk "Dari Sakura ke Nusantara: Merajut Literasi dan Warisan Budaya Menjadi Sumber Ekonomi", yang digelar pada Selasa malam, 9 September 2025, di Kafe Tenku, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Ruang Gagasan CORE Indonesia dan Komunitas Ngariksa, yang menghadirkan para pelaku ekonomi kreatif, pemerhati naskah kuno, komunitas budaya, hingga akademisi lintas disiplin.

Diskusi ini menghadirkan Tamaki Hoshi, penulis novel budaya sekaligus Putri Jepang 2021, sebagai narasumber utama. Ia menyoroti pentingnya nilai estetika dalam setiap elemen budaya dan bagaimana narasi budaya mampu menciptakan daya tarik ekonomi. "Saya memahami hal ini ketika mengamati batik, tiap daerah memiliki perbedaan corak dan cerita. Jika tiap motif itu dihadirkan dalam bentuk yang bisa dikoleksi, seperti boneka berbatik dari setiap daerah, orang akan lebih tertarik menjelajah budaya Indonesia," ujarnya.

Gagasan ini menunjukkan bahwa narasi budaya dapat diterjemahkan menjadi produk ekonomi yang berdaya tarik global, tanpa kehilangan makna kulturalnya.



TANTANGAN MENJADIKAN WARISAN BUDAYA SEBAGAI BASIS EKONOMI KREATIF

Pertama, kesenjangan literasi budaya. Banyak generasi muda belum mengenal nilai historis dan makna filosofis dari warisan budaya bangsa. Pengetahuan mengenai naskah kuno, tradisi lisan, atau simbol-simbol budaya mulai terpinggirkan dari arus pendidikan modern. Padahal, literasi budaya merupakan dasar bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi berbasis kearifan lokal.

Kedua, rendahnya pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber inspirasi ekonomi. Padahal, seperti diungkapkan **Prof. Oman**

Fathurahman, pakar filologi sekaligus penerima Habibie Prize 2023, Indonesia memiliki ribuan naskah kuno yang telah didigitalkan – memuat pengetahuan tentang agama, pengobatan, teknologi, hingga tata kelola negara. “Naskah tentang gempa dan banjir bisa jadi referensi mitigasi bencana; ada juga komunitas yang membuat batik dari iluminasi naskah kuno. Namun sayangnya, belum banyak yang mengeksplorasi kekayaan ini,” jelasnya.

Ketiga, terbatasnya kolaborasi lintas sektor antara akademisi, komunitas budaya, dan pelaku industri kreatif. Banyak inisiatif masih berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan riset dan kebijakan yang berkelanjutan. Akibatnya, potensi ekonomi dari warisan budaya belum terhubung dengan ekosistem bisnis dan inovasi modern.

Keempat, belum adanya kebijakan yang secara sistematis mendorong **ekonomi berbasis budaya** sebagai strategi pembangunan nasional. Sementara Jepang menjadikan budaya sebagai fondasi utama pariwisata, desain, dan produk ritel, Indonesia masih memandang kebudayaan sebagai sektor pendukung, bukan penggerak ekonomi.

KESIMPULAN

Diskusi ini menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa literasi budaya dan kolaborasi lintas bangsa dapat menjadi jalan baru bagi pembangunan ekonomi yang berakar pada nilai. Kehadiran Tamaki Hoshi, bersama para akademisi dan pelaku ekonomi kreatif Indonesia, menegaskan bahwa budaya memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan diplomasi sekaligus sumber inovasi ekonomi.

Warisan budaya Indonesia – dari naskah kuno hingga seni rupa tradisional – menyimpan nilai-nilai yang relevan dengan tantangan masa kini. Jika dikelola dengan pendekatan kreatif dan kolaboratif, budaya tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga motor ekonomi berkelanjutan yang memperkuat ketahanan nasional dan posisi Indonesia di mata dunia.

Sebagaimana diungkapkan Hendri Saparini, “Pemanfaatan budaya untuk menciptakan nilai tambah adalah strategi ekonomi masa depan.” Kolaborasi antara akademisi, komunitas, dan pelaku usaha menjadi langkah penting untuk menumbuhkan ekonomi berbasis warisan budaya, sebuah ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga merawat makna.

REKOMENDASI

- **Integrasikan Budaya dalam Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional.** Kebijakan ekonomi kreatif harus menjadikan budaya sebagai pusat inovasi. Pemerintah dapat memperluas program *Ekonomi Kreatif Berbasis Warisan Budaya* yang menghubungkan riset, komunitas, dan pelaku usaha. Setiap produk ekonomi dari pariwisata, kuliner, hingga desain perlu membawa narasi budaya yang autentik.
- **Penguatan Literasi dan Digitalisasi Warisan Budaya.** Upaya digitalisasi naskah kuno dan arsip budaya perlu diperluas agar menjadi sumber pengetahuan terbuka. Platform daring seperti *Digital Manuscript Library* dapat dikembangkan lebih jauh untuk menghubungkan riset akademik dengan industri kreatif. Literasi budaya juga dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan agar generasi muda lebih memahami akar budayanya sendiri.
- **Kolaborasi Lintas Budaya dan Pertukaran Internasional.** Kegiatan seperti *Dari Sakura ke Nusantara* perlu diperbanyak untuk memperkuat jembatan diplomasi budaya. Pertukaran pemuda, residensi seniman, dan kolaborasi universitas seperti CORE Indonesia–Tokyo City University dapat membuka peluang penciptaan produk kreatif lintas negara.

- **Mendorong Industri Kreatif Berbasis Narasi Lokal.** Pelaku usaha muda perlu didorong untuk mengembangkan produk dengan cerita dan nilai budaya. Inspirasi dari naskah kuno, mitologi daerah, atau simbol tradisi dapat menjadi bahan bagi pengembangan desain modern, film, maupun pariwisata tematik.
- **Kemitraan Riset dan Kebijakan.** Pemerintah perlu menjalin kemitraan strategis dengan lembaga riset dan komunitas budaya dalam menyusun roadmap ekonomi berbasis warisan budaya. Hal ini dapat memandu arah pengembangan subsektor kreatif sekaligus memastikan keberlanjutan nilai-nilai budaya di tengah tekanan pasar global.



Ruang Gagasan edisi "Rayakan Kemerdekaan, Raih Peluang Global". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 14 Agustus 2025



Ruang Gagasan edisi "Rayakan Kemerdekaan, Raih Peluang Global". CORESight Hub, Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kamis, 14 Agustus 2025



PENUTUP

PERSOALAN EKONOMI DI MATA GENERASI MUDA

Indonesia menghadapi berbagai tantangan strategis di sektor lingkungan, pendidikan, ekonomi, dan teknologi yang memerlukan peran aktif generasi muda. Penurunan emisi, akses pendidikan yang lebih terjangkau, pengembangan UMKM untuk pasar global, regenerasi petani muda, serta program magang adalah isu-isu kunci yang membutuhkan solusi inovatif dan dukungan pemerintah. Pengelolaan sampah dan teknologi AI juga memerlukan regulasi yang tepat untuk menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kebijakan kolaboratif dan inovasi berkelanjutan, Indonesia dapat memanfaatkan potensi generasi muda dan membangun ekonomi yang tangguh menuju 2045.

TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara diskusi Ruang Gagasan, termasuk para mitra komunitas yang telah menjadi bagian penting dari acara ini. Dukungan, antusiasme, dan partisipasi aktif dari semua pihak memungkinkan lahirnya ide-ide segar yang relevan dan inspiratif untuk pembangunan masa depan Indonesia.

Harapan kami, semoga diskusi ini tidak hanya menjadi ruang untuk bertukar gagasan, tetapi juga menjadi awal dari langkah konkret dalam mewujudkan solusi bersama. Kami percaya, dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, generasi muda Indonesia mampu menghadirkan perubahan yang positif dan membangun Indonesia yang lebih berkelanjutan serta berdaya saing.

SUARA-SUARA GENERASI MUDA UNTUK BANGSA

TIM PENYUSUN

CORE Indonesia

Fitri Yana

Huzni Mubarok

Muh Afdhal Mubarak AS

Editor

Hadi Rahman

Lay-Out

Nando Purnama Aji

Irzal Eka Saputra

November 2025

SUARA-SUARA GENERASI MUDA UNTUK BANGSA

GAGASAN KOMUNITAS MUDA RUANG GAGASAN
TENTANG EKONOMI INDONESIA



**CORE INDONESIA BERKOMITMEN MEMFASILITASI ANAK MUDA
UNTUK BERPARTISIPASI AKTIF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN.**

KAMI MENYELENGGARAKAN BERBAGAI KEGIATAN SEPERTI DISKUSI
TEMATIK, BINCANG EKONOMI DAERAH, PELATIHAN UKM MUDA,
PEMBEKALAN BIROKRAT MUDA, KULIAH UMUM DI KAMPUS,
KUNJUNGAN LAPANGAN BISNIS, DAN SEBAGAINYA. KOMUNIKASI
KOMUNITAS MUDA INI ADALAH SALAH SATU HASIL
DARI DISKUSI REGULER DALAM WADAH

RUANG GAGASAN. KAMI MEMBUKA KESEMPATAN BAGI MUDA-MUDI
UNTUK TURUT BERGABUNG DALAM KOMUNITAS INI UNTUK BERKOLABORASI
DAN BERINOVASI. KAMI JUGA MENGUNDANG MITRA-MITRA YANG TERTARIK
UNTUK BERGANDENG TANGAN MENGEMBANGKAN INISIASI
DAN PRAKTIK BAIK UNTUK MASA DEPAN GENERASI MUDA INDONESIA.